

# RENCANA KERJA

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan  
dan Tata Lingkungan

## TAHUN 2018



**7 TUJUAN REFORMA AGRARIA**

-  Mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah
-  Menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat
-  Memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup
-  Meningkatkan ketahanan pangan
-  Menyelesaikan konflik agraria
-  Memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi
-  Mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN





**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN  
DAN TATA LINGKUNGAN**

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN  
TATA LINGKUNGAN**

**Nomor: P.7/PKTL/SETDIT/KEU.0/11/2017**

**TENTANG  
RENCANA KERJA  
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN  
TATA LINGKUNGAN TAHUN 2018**

**DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan pasal 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.52/MENLHK-SETJEN/ROKUM.1/10/2017 Tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018, perlu disusun dan ditetapkan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);

6. Peraturan...

6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/MENHUT-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 460);
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/MENHUT-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 381);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.18/MENLHK-II/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.39/MENLHK-II/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1195);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.40/MENLHK-II/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1196);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.6/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 203);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/MENLHK-SETJEN/ROKUM.1/10/2017 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK-SETJEN/ROKUM.1/10/2017 Tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1508);
16. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.9/PKTL-SET/2015 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019;
17. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.04/PKTL/SETDIT/KEU.0/10/2016 Tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:...

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TENTANG RENCANA KERJA DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TAHUN 2018.**

Pasal 1

Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 merupakan pedoman dan acuan dalam:

1. Penyusunan Rencana Kerja unit kerja Eselon II dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Tahun 2018.
2. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2018.

Pasal 3

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 November 2017

DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI  
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
dan Kerjasama Teknik,



ENDI SUGANDI  
NIP. 19651123 199803 1 005

SIGIT HARDWINARTO  
NIP. 19610202 198603 1 003

**Lampiran**

**Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan**

**Nomor : P.7 /PKTL/SETDIT/Keu.0/11/2017**

**Tanggal : 23 November 2017**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA**

**DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN**

**DAN TATA LINGKUNGAN TAHUN 2018**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR TABEL .....	ii
DAFTAR GAMBAR .....	iii
DAFTAR LAMPIRAN .....	iv
PENGANTAR DIREKTUR JENDERAL .....	v
I. PENDAHULUAN .....	1
1. Latar Belakang .....	1
2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi .....	3
3. Struktur Organisasi dan SDM .....	4
II. REVIEW CAPAIAN SASARAN PROGRAM .....	6
III. RENCANA KERJA TAHUN 2018 .....	22
IV. PENUTUP .....	33

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Wilayah Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH)	5
Tabel 2 . Rincian Pegawai Lingkup Ditjen PKTL 2018	5
Tabel 3. Output Program dan Indikator Output Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2018	24
Tabel 4. Matriks Penjabaran Program dan Kegiatan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	26
Tabel 5. Kegiatan dan Anggaran Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2018	30



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Sepuluh Prioritas Nasional serta Program Prioritasnya	1
Gambar 2. Susunan Organisasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	4
Gambar 3. Target dan Realisasi Tata Batas Kawasan Hutan	6
Gambar 4. Target dan Realisasi Penetapan Kawasan Hutan	7
Gambar 5. Pelepasan, Tukar Menukar dan Penggunaan Kawasan Hutan sd September 2017	8
Gambar 6. Kriteria dalam Identifikasi Sumber TORA dari Kawasan Hutan.	9
Gambar 7. Luas Indikatif Kawasan Hutan untuk Penyediaan TORA per Provinsi	10
Gambar 8. Luas Indikatif Kawasan Hutan untuk Penyediaan TORA berdasarkan Kriteria	10
Gambar 9. Target dan Realisasi Penyelesaian TORA dari Kawasan Hutan	11
Gambar 10. Identifikasi Awal Sementara Perencanaan Pencadangan Kawasan Hutan untuk Pencetakan Sawah Baru	12
Gambar 11. Target dan Realisasi Inventarisasi Hutan Nasional (Enumerasi dan Re-Enumerasi) Sampai Tahun 2017	13
Gambar 12. Peta Penutupan Lahan Tahun 2016	14
Gambar 13. Peta Deforestasi Indonesia Tahun 2015 – 2016	14
Gambar 14. Target dan Realisasi Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Tahun 2016	15
Gambar 15. Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Revisi XII	16
Gambar 16. Luas Areal Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru	17
Gambar 17. Target dan Realisasi Fasilitasi Rancangan Tata Hutan dan Rancangan RencanaPengelolaan Hutan KPH	18
Gambar 18. Target dan Realisasi KLHS Terjamin Kualitas Berbasis DD DT	20
Gambar 19. KLHS tereview kelayakannya	20
Gambar 20. Perkembangan Kegiatan Penyusunan dan Penilaian Amdal dan Pelaksanaan Evaluasi Kinerja terhadap KPA	21
Gambar 21. Resume RKP Ditjen PKTL Tahun 2018	23
Gambar 22. Proyek Prioritas pada Ditjen PKTL 2018	26

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2018 .....	34
Lampiran 2. Matriks Rangkuman Kegiatan Rinci pada Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2018 .....	40
Lampiran 3. Kegiatan Penataan Batas Kawasan Hutan sampai dengan Tahun 2017 .....	48
Lampiran 4. Kegiatan Fasilitasi Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan KPH sampai dengan Tahun 2017 .....	49
Lampiran 5. Kegiatan Fasilitasi Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan KPH Tahun Anggaran 2018 .....	49
Lampiran 6. Target dan Realisasi Inventarisasi Sumber Daya Hutan .....	51
Lampiran 7. Target Penyelesaian TORA Tahun 2018.....	52
Lampiran 8. Target dan Realisasi Sasaran Tersusunnya RPPLH Nasional dan RPPLH Daerah untuk menjadi acuan dalam RPJMN/RPJMD .....	53

## PENGANTAR DIREKTUR JENDERAL

Rencana Kerja Direktorat Jenderal (Ditjen) Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2018 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018, Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018, serta merupakan penjabaran tahun keempat dari Rencana Strategis Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019.

Perubahan Paradigma perencanaan pembangunan dari *Money Follow Function* menjadi *Money Follow Program* dimana seluruh program dan kegiatan pada setiap Kementerian/Lembaga harus terintegrasi dan mendukung tercapainya sasaran prioritas pembangunan nasional dan berorientasi manfaat untuk rakyat.

Pada prinsipnya, tugas dan fungsi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan berperan dalam pencapaian seluruh prioritas nasional pembangunan tahun 2018. Dalam rangka mendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan khususnya terkait alokasi lahan, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan secara khusus mendukung prioritas pembangunan wilayah terutama program prioritas reforma agraria dan pembangunan pedesaan diantaranya melalui penyediaan sumber tanah Obyek reforma agraria dari kawasan hutan dengan tetap terintegrasi dengan upaya pemantapan kawasan hutan dan upaya pencegahan dampak lingkungan yang berkelanjutan.

Rencana Kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2018 memuat garis besar (gambaran) kegiatan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan selama satu tahun pada seluruh satker lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan baik pusat maupun daerah.

Rencana kerja ini selanjutnya menjadi acuan seluruh unit kerja dalam menyusun rencana kerja dan anggaran masing-masing serta sebagai penjabaran dan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Akhir kata, semoga Rencana Kerja ini bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 23 November 2017  
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan,



**SIGIT HARDWINARTO**

NIP. 19610202 198603 1 003



# I. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang

Sebagai sesuai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018 yang bertema “*Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan*”, Pemerintah telah menetapkan 10 prioritas nasional pembangunan tahun 2018. Sepuluh prioritas nasional tersebut serta program prioritasnya adalah sebagai berikut:

<b>Pendidikan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Vokasi</li> <li>• Peningkatan kualitas guru</li> </ul>
<b>Kesehatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak</li> <li>• Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit</li> <li>• Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)</li> </ul>
<b>Perumahan dan Pemukiman</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan Perumahan Layak</li> <li>• Air Bersih dan Sanitasi</li> </ul>
<b>Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10)</li> <li>• Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10)</li> <li>• Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14)</li> <li>• Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja</li> <li>• Pengembangan Ekspor Barang Jasa Bernilai Tambah Tinggi</li> </ul>
<b>Ketahanan Energi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EBT dan Konservasi Energi</li> <li>• Pemenuhan Kebutuhan Energi</li> </ul>
<b>Ketahanan Pangan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Produksi pangan</li> <li>• Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi)</li> </ul>
<b>Penanggulangan Kemiskinan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran</li> <li>• Pemenuhan Kebutuhan Dasar</li> <li>• Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi</li> </ul>
<b>Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi</li> <li>• Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika</li> </ul>
<b>Pembangunan wilayah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal</li> <li>• Pembangunan Perdesaan</li> <li>• Reforma Agraria</li> <li>• Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l Kebakaran Hutan)</li> <li>• Percepatan Pembangunan Papua</li> </ul>
<b>Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan Pertahanan</li> <li>• Stabilitas Politik dan Keamanan</li> <li>• Kepastian Hukum</li> <li>• Reformasi Birokrasi</li> </ul>

Gambar 1. Sepuluh Prioritas Nasional serta Program Prioritasnya

Seluruh prioritas nasional tersebut didukung oleh beberapa pengarusutamaan pembangunan yaitu revolusi mental, kesetaraan gender, perubahan iklim, pemerataan, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sesuai tujuan utama pembangunan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yaitu *memastikan kawasan hutan yang mantap dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional*, maka pada prinsipnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mendukung pencapaian sasaran seluruh prioritas nasional pembangunan tersebut terutama melalui pelaksanaan arah kebijakan sesuai Rencana Strategis 2015-2019 sebagai berikut:

1. Mempercepat pemantapan kawasan hutan, inventarisasi sumber daya hutan, penyelesaian tata batas kawasan hutan, percepatan penyelesaian pemetaan dan penetapan seluruh kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, integrasi perencanaan kawasan hutan, penyiapan prakondisi untuk meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak dan mempermudah perizinan yang jelas, cepat dan terukur, terutama dalam mendukung penyediaan lahan dan penyelesaian Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) di kawasan hutan.
2. Mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah.

Dalam hal ini, Rencana Kerja Pemerintah menjadi dasar dalam pemutakhiran rancangan Renja KLHK menjadi Renja KLHK. KLHK telah menyusun rancangan Renja KLHK yang mengacu pada Renstra KLHK, rancangan awal RKP dan pagu indikatif dengan menggunakan sistem aplikasi *e-planning* KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran). Sejalan dengan hal tersebut, Ditjen PKTL menyusun Renja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2018 mengacu pada Renja KLHK. Dokumen Renja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2018 menjadi acuan bagi Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) selaku penanggungjawab kegiatan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan.



**"Pastikan juga bahwa program-program di Kementerian dan Lembaga yang saudara-saudara pimpin betul-betul produktif dan berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, ini penting sekali digaribawahi, dan membuka lapangan pekerjaan, mengentaskan kemiskinan serta menekan ketimpangan"**

*Arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Kabinet Paripurna Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 di Istana Negara Jakarta*

*1 Februari 2017.*

## 2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan dipimpin oleh Direktur Jenderal. Adapun tugas Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan kehutanan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, kehutanan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, serta kajian lingkungan hidup strategis, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan kajian dampak lingkungan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, dan lingkungan hidup dan kehutanan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, serta kajian dampak lingkungan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, serta kajian dampak lingkungan;
- d. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kajian lingkungan hidup strategis, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, serta kajian dampak lingkungan;
- e. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, dan kajian lingkungan hidup strategis, serta kajian dampak lingkungan di daerah;

- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, dan kajian lingkungan hidup strategis, serta kajian dampak lingkungan;
- g. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

### 3. Struktur Organisasi dan SDM

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mempunyai 6 (enam) Eselon II, yaitu:



Gambar 2. Susunan Organisasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Selain satker Eselon II di pusat, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan memiliki 22 satker Unit Pelaksana Teknis (UPT) **Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH)** yang memiliki tugas antara lain melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi serta perubahan status/peruntukan kawasan hutan, penyajian data dan informasi pemanfaatan kawasan hutan, penilaian penggunaan kawasan hutan, dan penyajian data informasi sumberdaya hutan. Adapun wilayah kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) tersebut adalah sebagai berikut:



Tabel 1. Wilayah Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH)

No	BPKH	Wilayah Kerja
1	BPKH Wilayah I Medan	Sumatera Utara, Sumatera Barat
2	BPKH Wilayah II Palembang	Sumatera Selatan
3	BPKH Wilayah III Pontianak	Kalimantan Barat
4	BPKH Wilayah IV Samarinda	Kalimantan Timur, Kalimantan Utara
5	BPKH Wilayah V Banjar Baru	Kalimantan Selatan
6	BPKH Wilayah VI Manado	Sulawesi Utara dan Maluku Utara
7	BPKH Wilayah VII Makassar	Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
8	BPKH Wilayah VIII Denpasar	Bali dan NTB
9	BPKH Wilayah IX Ambon	Maluku
10	BPKH Wilayah X Jayapura	Papua
11	BPKH Wilayah XI D.I Yogyakarta	Pulau Jawa dan Madura
12	BPKH Wilayah XII Tanjungpinang	Kepulauan Riau
13	BPKH Wilayah XIII Pangkalpinang	Jambi dan Bangka Belitung
14	BPKH Wilayah XIV Kupang	NTT
15	BPKH Wilayah XV Gorontalo	Gorontalo
16	BPKH Wilayah XVI Palu	Sulawesi Tengah
17	BPKH Wilayah XVII Manokwari	Papua Barat
18	BPKH Wilayah XVIII Banda Aceh	Aceh
19	BPKH Wilayah XIX Pekanbaru	Riau
20	BPKH Wilayah XX Bandar Lampung	Lampung dan Bengkulu
21	BPKH Wilayah XXI Palangkaraya	Kalimantan Tengah
22	BPKH Wilayah XXII Kendari	Sulawesi Tenggara

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan target dan kegiatan tahun 2018, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan memiliki jumlah tenaga pegawai sebanyak 1.886 pegawai yang terdiri atas 1.429 Pegawai Negeri Sipil (PNS), diantaranya terdapat pegawai fungsional dan 457 Pegawai Non PNS sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 2. Rincian Pegawai Lingkup Ditjen PKTL 2018

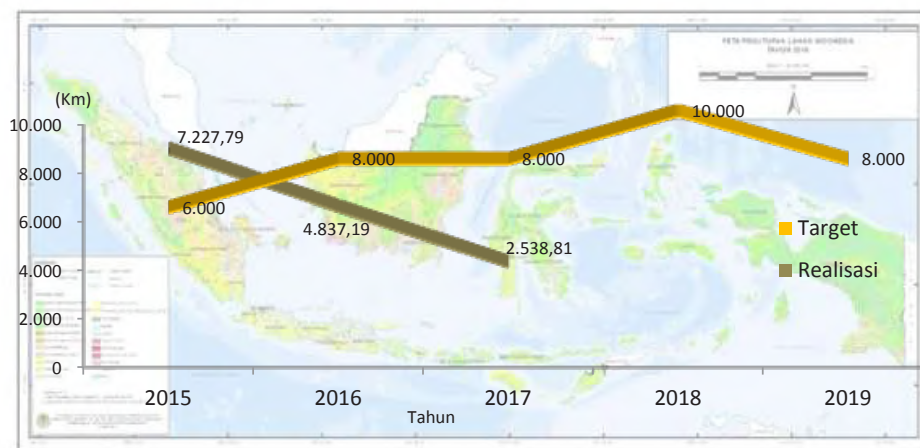
Satker	Jumlah Pegawai PNS	Jumlah Pegawai Non PNS
<b>Ditjen PKTL</b>	<b>1.429</b>	<b>457</b>
<b>PUSAT</b>	<b>412</b>	<b>74</b>
Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	82	15
Direktorat Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	97	13
Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	63	8
Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	95	26
Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	37	4
Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	38	8
<b>BPKH Wilayah I-XXII</b>	<b>1.017</b>	<b>383</b>

Sumber : Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Data sd November 2017

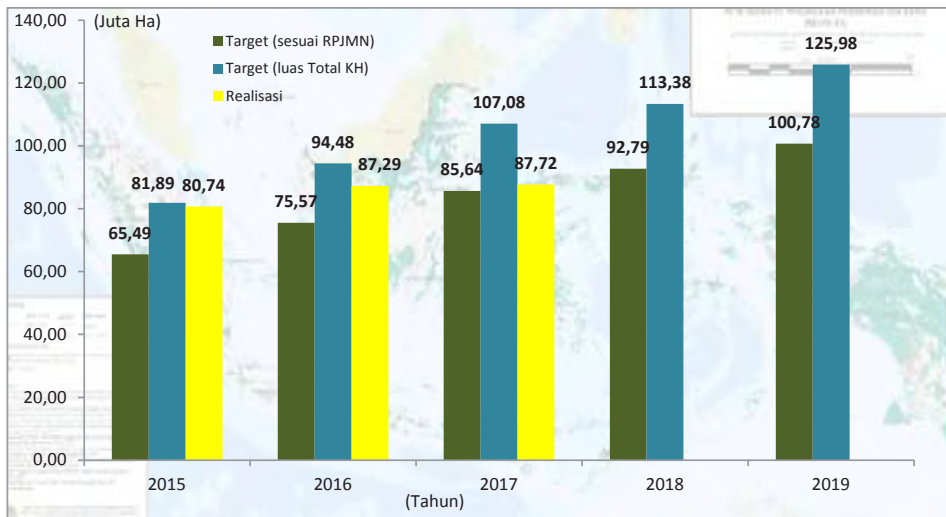
## II. REVIEW CAPAIAN SASARAN PROGRAM

### 1. Penataan Batas dan Penetapan Kawasan Hutan

Sampai dengan saat ini, kawasan hutan dan konservasi perairan Indonesia adalah seluas 125.956.142,71 Ha terdiri dari daratan 120.634.821,71 Ha dan konservasi perairan 5.321.321 Ha. Penataan batas dan penetapan kawasan hutan selain sebagai upaya memberikan kejelasan batas dan status hukum (legal) atas kawasan hutan, juga untuk mendapatkan pengakuan/legitimasi publik serta kepastian hak atas tanah bagi masyarakat yang berbatasan dan atau disekitar kawasan hutan. Sesuai RPJMN Tahun 2015-2019, sampai dengan tahun 2019 minimal 80% dari total kawasan hutan ditargetkan selesai ditetapkan. Untuk mencapai target tersebut, dalam periode 2015 sampai 2019 minimal tata batas kawasan hutan yang harus diselesaikan sepanjang 40.000 kilometer, dengan target tata batas kawasan hutan per tahun sebagaimana ditampilkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Target dan Realisasi Tata Batas Kawasan Hutan  
Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

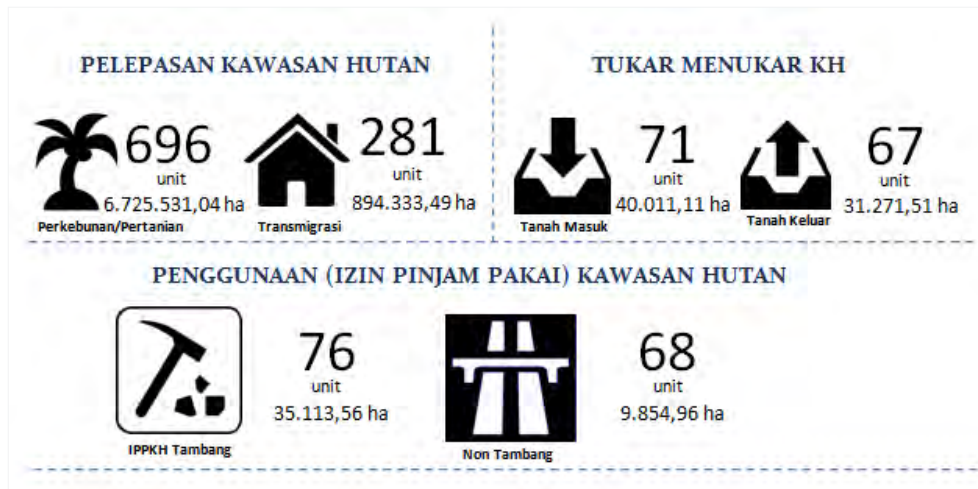


Gambar 4. Target dan Realisasi Penetapan Kawasan Hutan  
 Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Dari gambar 4 di atas, realisasi penetapan kawasan hutan khususnya tahun 2016 dan 2017 telah mencapai target sesuai Renstra Ditjen Planologi kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019. Dalam rangka mencapai target akhir Renstra pada tahun 2019, Ditjen Planologi kehutanan dan Tata Lingkungan memprioritaskan lokus tata batas pada kawasan yang hampir temu gelang.

## 2. Dukungan penyediaan lahan untuk sektor non kehutanan

Kebutuhan akan lahan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Salah satu opsi pemenuhan akan kebutuhan lahan tersebut berasal dari pelepasan kawasan (untuk pemukiman transmigrasi maupun perkebunan/pertanian), tukar menukar kawasan hutan maupun penggunaan kawasan hutan (pinjam pakai kawasan hutan). Alokasi kawasan hutan untuk mendukung sektor non kehutanan dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan dan daya dukung ekosistem, keberpihakan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Realisasi pelaksanaan pelepasan, tukar menukar dan penggunaan kawasan hutan sampai dengan September tahun 2017 ditampilkan pada gambar 5.



Gambar 5. Pelepasan, Tukar Menukar dan Penggunaan Kawasan Hutan s.d September 2017

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

### 3. Identifikasi dan Penyelesaian Tanah Obyek Reforma Agraria dari Kawasan Hutan

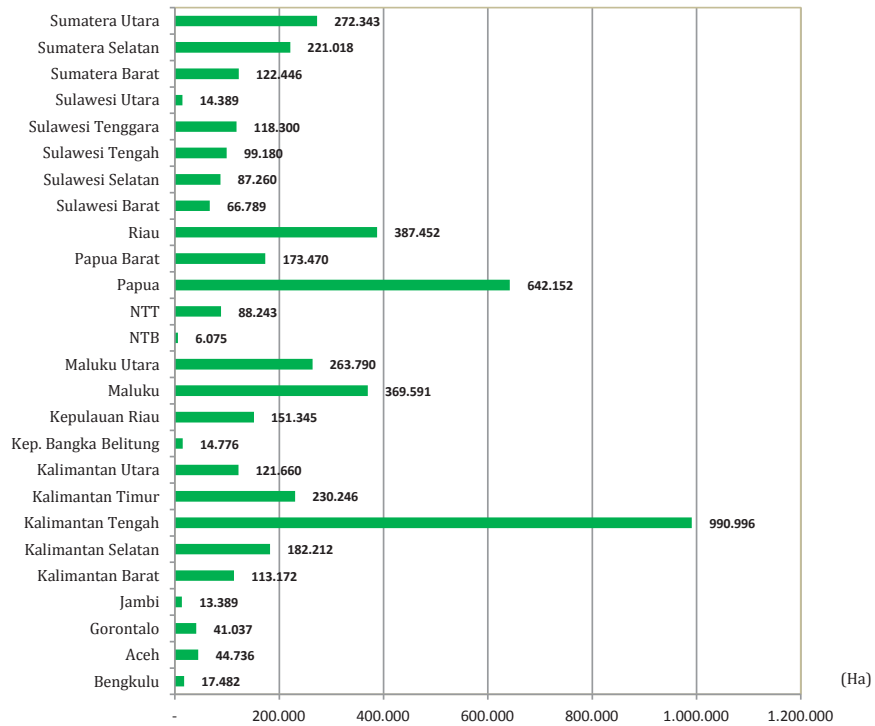
Agenda prioritas Nawacita memuat agenda reforma agraria dan strategi membangun Indonesia dari pinggiran, dimulai dari daerah dan desa. Nawacita kemudian dituangkan dalam RPJMN 2015–2019. Sesuai Agenda Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2015-2019, khususnya agenda kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia dengan sub agenda peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal, salah satu sasaran yang harus dicapai adalah penyediaan (legalisasi dan redistribusi) Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) yang diantaranya berasal dari kawasan hutan seluas 4,1 juta Ha. Tujuan dari reforma agraria adalah mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, menciptakan sumber-sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria, menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan, memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi, meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan serta memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup serta menangani dan menyelesaikan konflik agraria.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dimandatkan untuk melakukan identifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan sedikitnya sebanyak 4,1 juta Ha. Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah melakukan identifikasi terhadap kawasan hutan seluas 4,1 juta Ha yang dapat dilepaskan dalam rangka penyediaan TORA dengan kriteria sebagaimana ditampilkan pada Gambar 6.



Gambar 6. Kriteria dalam Identifikasi Sumber TORA dalam Kawasan Hutan.

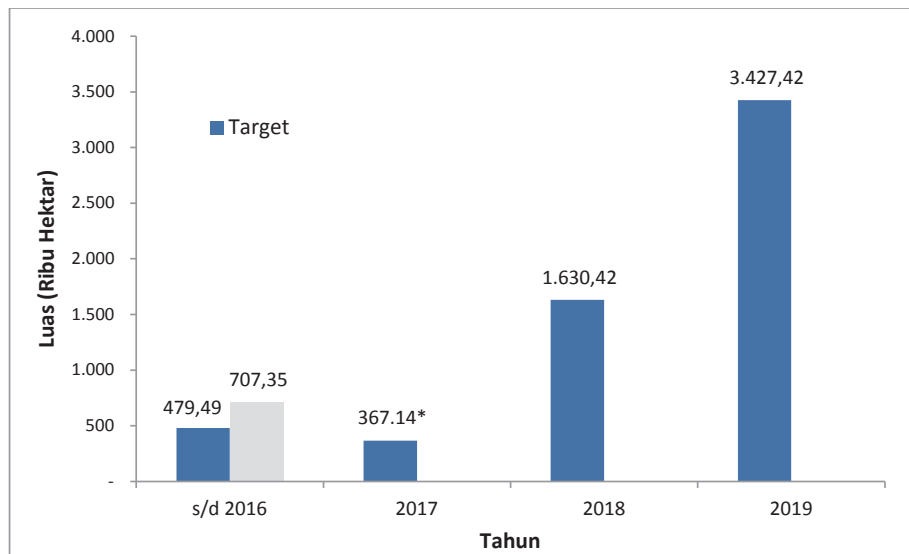
Sejalan dengan tujuan dari reforma agraria, identifikasi lokasi TORA yang berasal dari kawasan hutan tersebut diarahkan dalam rangka memberi kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat di dalam kawasan hutan dan menyelesaikan sengketa dan konflik dalam kawasan hutan. Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat kurang lebih 4,8 juta Ha indikatif calon lokasi TORA yang berasal dari kawasan hutan dengan kriteria (1) alokasi 20% dari seluruh pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan; (2) hutan produksi yang dapat diKonversi (HPK) tidak produktif; (3) program Pemerintah untuk pencadangan pencetakan sawah baru; (4) permukiman transmigrasi beserta fasos-fasumnya yang sudah memperoleh persetujuan prinsip; (5) permukiman, fasos dan fasum; (6) lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat; serta (7) Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat. Hasil identifikasi tersebut telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 180/MENLLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Peta Indikatif Lokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA). Rincian luas indikatif kawasan hutan untuk penyediaan TORA per provinsi sebagaimana ditampilkan pada Gambar 7, serta luas indikatif kawasan hutan untuk penyediaan TORA berdasarkan Kriteria sebagaimana ditampilkan pada Gambar 8.



Gambar 7. Luas Indikatif Kawasan Hutan untuk Penyediaan TORA per Provinsi  
 Sumber: Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan



Gambar 8. Luas Indikatif Kawasan Hutan untuk Penyediaan TORA berdasarkan Kriteria  
 Sumber: Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

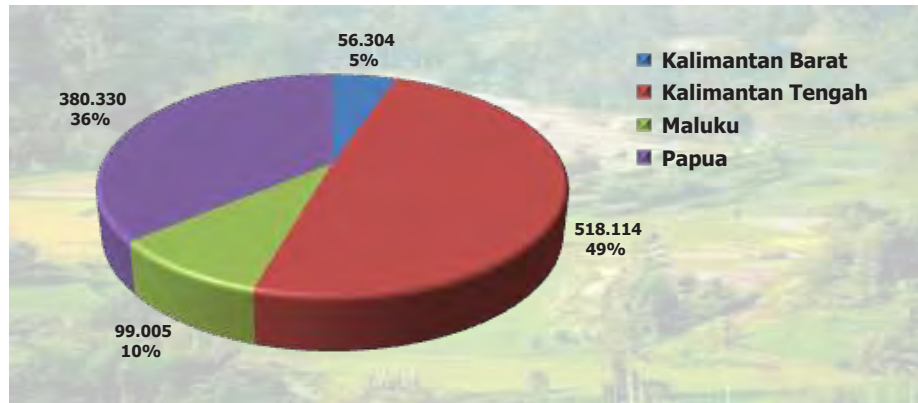


Gambar 9. Target dan Realisasi Penyelesaian TORA dari Kawasan Hutan  
Ket: \* Pencapaian tergantung ketersediaan anggaran

Berdasarkan grafik pada gambar 9, sampai dengan tahun 2016 kawasan hutan yang telah dilepaskan dalam rangka penyediaan Obyek TORA adalah seluas 707.346 Ha melalui proses penataan batas kawasan hutan, perubahan kawasan hutan dalam proses Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, serta 20% kawasan hutan yang dilepaskan untuk perkebunan. Dengan realisasi tersebut maka untuk memenuhi target seluas 4,1 juta terdapat peningkatan target tahunan yang signifikan, yaitu seluas 1.630.421 Ha (deviasi 11%) untuk tahun 2018 dengan target pelaksanaan penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA sepanjang 44.471 Km (termasuk kegiatan Fasilitasi Penandaan Batas Perhutanan Sosial Wilayah Jawa sepanjang 1.000 Km) dirinci pada Lampiran 7.

#### 4. Identifikasi dan Arahan Indikatif Kawasan Hutan Untuk Pencetakan Sawah Baru dan Areal Pangan Lainnya

Hasil identifikasi awal kawasan hutan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:



Gambar 10. Identifikasi Awal Sementara Perencanaan Pencadangan Kawasan Hutan untuk Pencetakan Sawah Baru

Lokasi rencana pencadangan pencetakan sawah dan areal pangan lainnya akan diverifikasi di lapangan guna mendapatkan data informasi kesesuaian lahan untuk pencetakan sawah dan areal pangan lainnya. Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan senantiasa siap dalam pelaksanaan kegiatan Identifikasi dan Arahan Indikatif Kawasan Hutan untuk Pencetakan Sawah Baru dan Areal Pangan Lainnya dengan dukungan dan kesiapan dari Kementerian Pertanian, Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.

#### 5. Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Nasional dan KPH

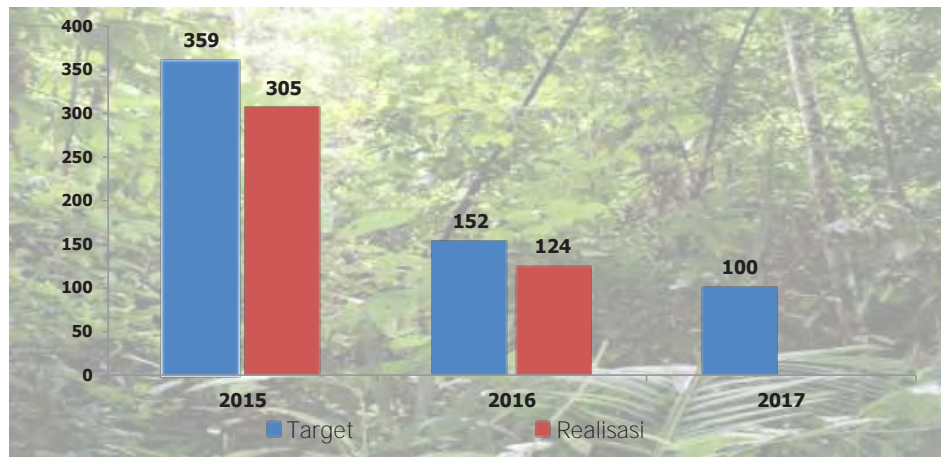
Data dan informasi sumber daya hutan sebagai bahan pengambilan keputusan dan kebijakan pengelolaan sumber daya hutan diperoleh melalui kegiatan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan.

##### a. Inventarisasi Hutan

Inventarisasi Hutan dilaksanakan melalui survei status dan keadaan fisik hutan, flora dan fauna, sumber daya manusia, serta kondisi sosial masyarakat di dalam dan di sekitar hutan.



Inventarisasi hutan tingkat nasional dilaksanakan di seluruh kawasan hutan di Indonesia melalui pengumpulan data dan informasi di lapangan dengan membuat plot-plot contoh berupa plot contoh sementara (*Temporary Sample Plot/TSP*) dan plot contoh permanen (*Permanent Sample Plot/PSP*). Kegiatan inventarisasi hutan dilaksanakan oleh 22 BPKH di seluruh Indonesia. Pelaksanaan Inventarisasi Hutan Nasional (Enumerasi dan Re-Enumerasi) ditampilkan dalam gambar 11 dan dirinci pada Lampiran 6.



Gambar 11. Target dan Realisasi Inventarisasi Hutan Nasional (Enumerasi dan Re-Enumerasi) sampai Tahun 2017

Sumber: Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

Berdasarkan gambar 11, target dan realisasi pelaksanaan Inventarisasi Hutan Nasional (Enumerasi dan Re-Enumerasi) sampai 2016 belum memenuhi target sesuai Renstra dikarenakan adanya ketersediaan dan penghematan anggaran. Demikian pula dengan rencana tahun 2018 dengan target sebesar 179 klaster (dirinci dalam lampiran 6) belum sesuai dengan target 330 klaster berdasarkan Renstra, dikarenakan ketersediaan anggaran yang difokuskan terhadap kegiatan penyelesaian Tanah Obyek Reforma Agraria dari Kawasan Hutan.

## b. Pemantauan Sumber daya Hutan

Pemantauan Sumber daya Hutan dilakukan dengan pemantauan dinamika tutupan hutan menggunakan teknologi penginderaan jauh. Data tutupan hutan diperoleh dari kegiatan penafsiran penutupan lahan.

Penafsiran penutupan lahan tahun 2016 dilakukan dengan langkah mengumpulkan citra satelit Landsat 8 OLI cakupan seluruh Indonesia yang didapatkan dari LAPAN dan NASA. Hasil penafsiran penutupan lahan selanjutnya digunakan untuk penghitungan rekalkulasi penutupan lahan 2016 sebagaimana gambar 12.



Gambar 12. Peta Penutupan Lahan Tahun 2016  
 Sumber: Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

Berdasarkan hasil penafsiran Citra Landsat 8 OLI liputan tahun 2015 dan 2016 telah disusun Peta Deforestasi Indonesia tahun 2015–2016 sebagaimana tersaji pada Gambar 13.



Gambar 13. Peta Deforestasi Indonesia Tahun 2015 – 2016  
 Sumber: Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

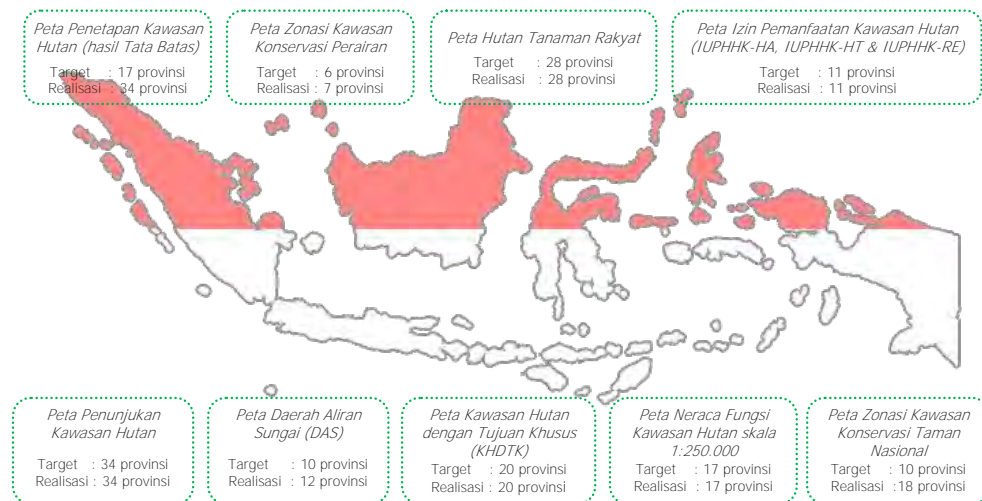
Penafsiran penutupan lahan digunakan dalam penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH). Melalui NSDH diharapkan dapat diketahui kondisi sumber daya hutan Indonesia dan laju perubahan sumber daya hutan. Data penutupan lahan juga digunakan untuk bahan penyusunan peta lahan kritis, PIPPIB, PIAPS, TORA, KLHS, Peta Potensi Hutan, FREL, RKTN dan lainnya. Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Potensi Sumber daya Hutan Nasional dan Kegiatan Pemantauan Sumber daya Hutan tahun 2018 ditargetkan pada 34 Provinsi sesuai dengan Renstra Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019.

### c. Penyediaan Data dan Informasi Potensi Sumber daya Hutan KPH

Inventarisasi hutan pada tingkat unit pengelolaan (KPH) dilaksanakan melalui survei status dan keadaan fisik hutan, flora dan fauna, sumber daya manusia, serta kondisi sosial masyarakat di dalam dan di sekitar hutan. Pengumpulan data lapangan dilakukan oleh tenaga teknis BPKH seluruh Indonesia. Realisasi pelaksanaan penyediaan data dan informasi potensi sumber daya hutan KPH tahun 2016 telah mencapai target Renstra, yaitu 100 KPH (358 KPH kumulatif sampai tahun 2016). Pelaksanaan kegiatan tahun 2018 dengan target 100 KPH sesuai dengan target berdasarkan Renstra Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019.

### d. Penyediaan Informasi Geospasial Tematik Lingkungan Hidup dan Kehutanan Mendukung Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*)

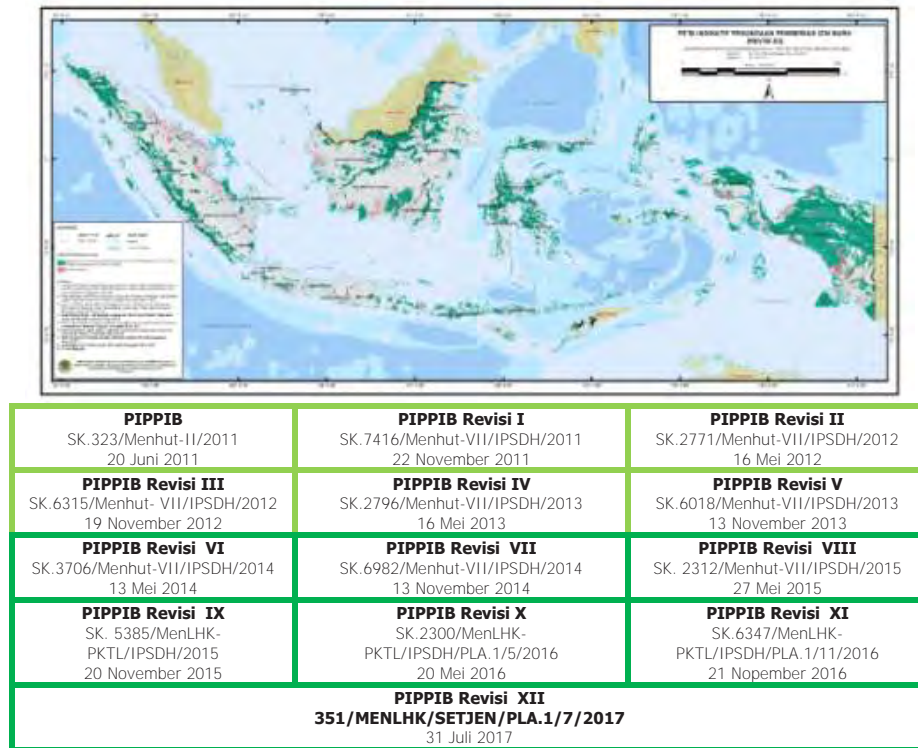
Penyelenggaraan Sistem Informasi Geospasial LHK yang terintegrasi dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional meliputi koordinasi dalam rangka Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta dan Pemetaan Areal indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB). Kebijakan satu peta merupakan implementasi dari Undang-Undang No.4 Tahun 2014 tentang Informasi Geospasial. Berdasarkan lampiran Perpres No.9/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat ketelitian Skala 1:50.000, dari 85 tema peta tematik, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendapat tanggung jawab 9 tema. Penyediaan Informasi Geospasial Tematik Lingkungan Hidup dan Kehutanan Mendukung Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*) Tahun 2018 dengan target 34 provinsi sesuai dengan target Renstra Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019.



Gambar 14. Target dan Realisasi Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta sd Tahun 2016

**e. Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB) Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut**

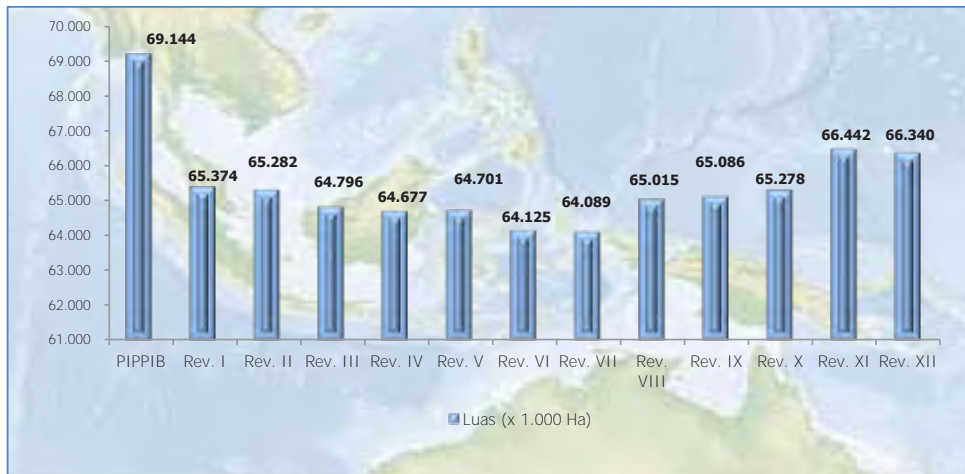
PIPPIB bertujuan untuk menyelesaikan berbagai upaya penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut yang tengah berlangsung untuk penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Perkembangan penetapan PIPPIB sebagaimana gambar 15.



Gambar 15. Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Revisi XII  
Sumber: Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

Revisi PIPPIB dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali dan telah dilakukan revisi XII sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 351/MENLHK/SETJEN/PLA.1/7/2017 tanggal 31 Juli 2017. Revisi PIPPIB dilakukan dengan memperhatikan hasil survei kondisi fisik lapangan, perubahan tata ruang, data dan informasi penutupan lahan terkini, masukan dari masyarakat dan pembaharuan data perizinan. Berdasarkan grafik pada gambar 16, luas areal PIPPIB terlihat dinamis untuk tiap periode. Faktor-faktor penyebab perubahan luas PIPPIB antara lain: konfirmasi perizinan yang terbit sebelum Inpres Nomor 10 Tahun 2011, perubahan data perizinan, perubahan data bidang tanah, perkembangan tata ruang, laporan hasil survei lahan

gambut, laporan hasil survei hutan alam primer dan data pengecualian moratorium.

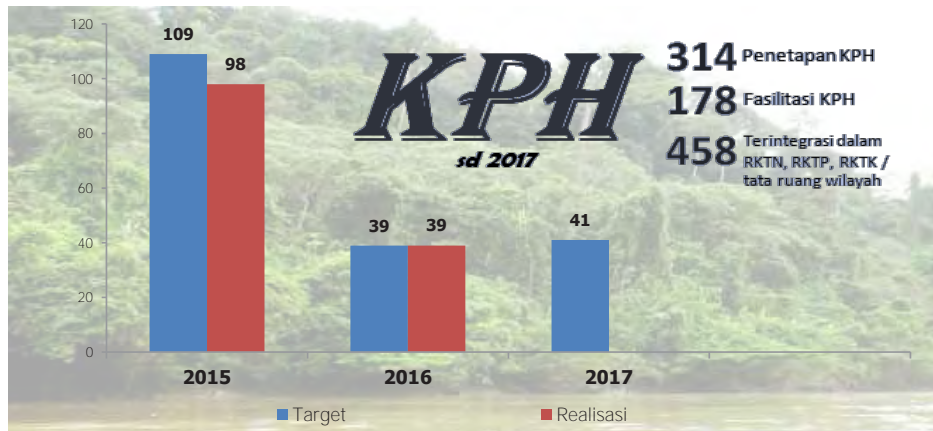


Gambar 16. Luas Areal Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru  
Sumber: Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber daya Hutan

Penyediaan Informasi Geospasial Tematik Lingkungan Hidup dan Kehutanan Mendukung Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*) Tahun 2018 dengan target 34 provinsi sesuai dengan target Renstra Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019.

## 6. Pembangunan KPH

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Seluruh kawasan hutan di Indonesia akan terbagi dalam wilayah-wilayah KPH serta akan menjadi bagian dari penguatan sistem pengurusan hutan nasional, provinsi, kabupaten/kota. Sesuai Renstra, target pembentukan KPH tahun 2015-2019 sebanyak 409 unit. Untuk mencapai target tersebut pelaksanaan Fasilitasi Rancangan Tata Hutan dan Rancangan Rencana Pengelolaan Hutan KPH ditargetkan mencapai 209 unit KPH sampai tahun 2016. Grafik target dan realisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan KPH ditampilkan pada gambar 17, dengan rincian unit KPH pada lampiran 4.



Gambar 17. Target dan Realisasi Fasilitasi Rancangan Tata Hutan dan Rancangan Rencana Pengelolaan Hutan KPH

Dari grafik pada Gambar 17, target realisasi Fasilitasi Rancangan Tata Hutan dan Rancangan Rencana Pengelolaan Hutan KPH belum memenuhi target 100 KPH berdasarkan Renstra. Hal tersebut akibat penghematan dan penyesuaian anggaran yang difokuskan terhadap kegiatan penyelesaian Tanah Obyek Reforma Agraria dari Kawasan Hutan. Sebaran lokasi unit KPH tahun 2018 dirinci dalam lampiran 5.

## 7. Upaya Pencegahan Dampak Lingkungan Terhadap Kebijakan Wilayah dan Sektor

Kegiatan pencegahan dampak lingkungan kebijakan dan sektor merupakan suatu elemen pendukung pembangunan berkelanjutan yang mengambil peran sebagai jaring pengaman lingkungan pada tahap paling awal dalam proses pembangunan, yaitu penentuan kebijakan. Aspek yang menjadi perhatian utama adalah kondisi lingkungan hidup saat ini, yang secara spesifik diidentifikasi sebagai kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, pada beberapa daerah yang selama puluhan tahun mengalami pembangunan secara pesat, berada pada titik yang mengancam keberlanjutan pembangunan itu sendiri.

Kegiatan pencegahan dampak lingkungan kebijakan dan sektor terbagi kedalam 3 (tiga) unsur utama, yaitu Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional dan Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai dokumen perencanaan lingkungan hidup yang harus menjadi acuan pembangunan (RPJM/RPJP), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai perangkat pengendalian atas kebijakan pembangunan (Kebijakan Program Kegiatan/KRP), serta Instrumen Ekonomi Lingkungan hidup sebagai perangkat pendukung terlaksananya mekanisme pengelolaan lingkungan hidup yang berkeadilan.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) merupakan hasil akhir dari rangkaian penyusunan perencanaan lingkungan hidup yang terdiri dari Inventarisasi Lingkungan Hidup, Pemetaan dan Penetapan Ekoregion, Perhitungan dan Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dan Penyusunan (RPPLH) yang ditetapkan secara berjenjang dari Tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai target RPPLH adalah Penyempurnaan dan Pengembangan Peta Ekoregion skala 1 : 250.000, Penyusunan Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, Penyusunan dan Penyempurnaan RPPLH Nasional, serta Fasilitasi Penyusunan RPPLH Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).

Sampai dengan tahun 2016, telah dihasilkan draft penetapan ekoregion Indonesia skala 1 : 500.000, dengan beberapa *exercise* pendetailan di ekoregion Jawa, Sumatera, dan Sulawesi pada skala 1 : 250.000. Selain itu juga dihasilkan draft Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dalam bentuk Peta Indikasi (Indek) Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup untuk Ekoregion Jawa dan Sumatera. Untuk penyusunan RPPLH, pada tingkat nasional telah disusun Draft Dokumen RPPLH Nasional yang akan menjadi lampiran Peraturan Pemerintah tentang RPPLH Nasional dan telah mengalami 2 (dua) kali penyempurnaan. Sementara untuk menunjang pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota, telah dikeluarkan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota dan telah dilakukan Bimbingan Teknis penyusunan RPPLH di 13 Provinsi dan 10 Kabupaten Kota di Ekoregion Jawa dan Sumatera. Target dan realisasi RPPLH Nasional dan RPPLH Daerah dirinci pada lampiran 8.

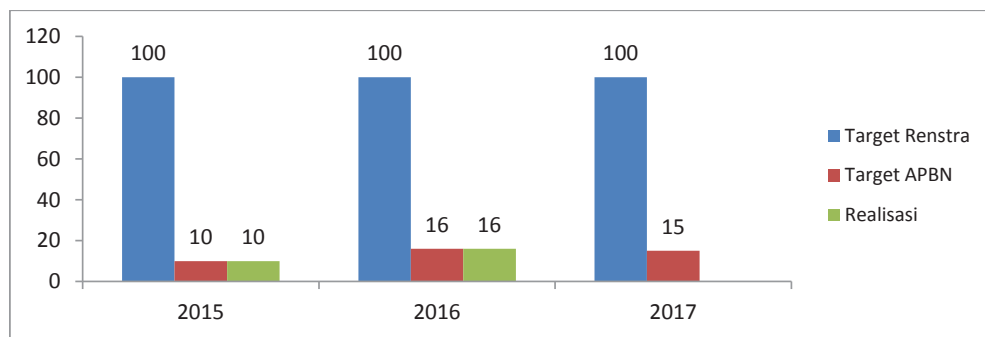
Titik berat KLHS adalah tersusunnya dokumen KLHS sebagai pengendali KRP dengan kualitas yang sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkan informasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup yang dapat dipertanggungjawabkan. KLHS memberikan batas dan arahan atas KRP sehingga program-program pembangunan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta tidak keluar dari kebijakan jangka panjang dalam RPPLH. Pelaksanaan pilkada serentak tahun 2015 dan 2016, merupakan awal dari setiap daerah tersebut dalam menyusun perencanaan 5 tahun ke depan (RPJMD) sehingga KLHS atas RPJMD dan Tata Ruang yang mungkin berubah menjadi hal yang sangat penting untuk diprioritaskan.

Dalam mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan serangkaian kegiatan yang mencakup: penyelesaian perangkat peraturan dan pedoman; bimbingan teknis dalam bentuk pendampingan, asistensi dan pemberian masukan; serta bantuan keahlian apabila dipandang perlu. Target dan Realisasi KLHS

ditampilkan pada gambar 18 dan 19. Sedangkan untuk sasaran tersusunnya Neraca SDA dan PDB Hijau Nasional dilaksanakan melalui fasilitasi kepada daerah dalam menyusun neraca SDALH dan PDRB Hijau sebagai input bagi Neraca SDALH dan PDB Hijau Nasional.



Gambar 18. Target dan Realisasi KLHS Terjamin Kualitas Berbasis DD DT  
Sumber: LKJ dan Renstra



Gambar 19. KLHS tereview kelayakannya  
Sumber: LKJ dan Renstra

Berdasarkan gambar 18, gambar 19, serta rincian lampiran 8, realisasi pelaksanaan penyusunan KLHS dan RPPLH Provinsi sampai 2016, belum mencapai target sesuai Renstra. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan dan penghematan anggaran, serta belum lengkapnya NSPK dan aturan baku tentang penyusunan RPPLH daerah. Lambatnya proses penyusunan NSPK disebabkan karena proses penyusunan tersebut melibatkan banyak sekali pihak terkait (K/L dan Daerah) sehingga memerlukan biaya, waktu yang panjang, dan pembahasan berulang untuk mencapai kesepakatan yang dapat dinormakan. Sedangkan untuk penyusunan NSDALH dan PDRB Hijau hanya dapat merealisasikan penyusunan PDRB Hijau (Kota Bogor) dan valuasi ekonomi ekosistem Provinsi Jawa Barat. Pelaksanaan kegiatan tahun 2018 dengan target 10 KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT, 15 KLHS yang tereview kelayakannya, 5 Provinsi RPPLH provinsi pada ekoregion Sulawesi, dan 1 NSDALH dan 1 PDRB Hijau di Kab/Kota di Ekoregion



Sumatera belum sesuai dengan Renstra dikarenakan penyesuaian anggaran yang difokuskan terhadap penyelesaian Tanah Obyek Reforma Agraria dari Kawasan Hutan.

## 8. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Sesuai dengan Pasal 2 PP Nomor 27 Tahun 2012, bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan. Izin lingkungan diperoleh melalui tahapan kegiatan: penyusunan Amdal dan UKL-UPL; penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan permohonan penerbitan Izin Lingkungan.

Disamping itu dilakukan Audit Lingkungan Hidup sebagai salah satu instrument pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan. Realisasi pelaksanaan kegiatan penyusunan dan penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL sampai dengan tahun 2016 sesuai dengan target Renstra Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Capaian indikator kinerja kegiatan pada tahun 2016 terealisasi proses penilaian 59 dokumen Amdal dan 10 formulir UKL-UPL dari target sebanyak 59 dokumen Amdal dan 10 formulir UKL-UPL, sehingga persentase capaian adalah 100 %.



### AMDAL

**2015** : 59 dokumen Amdal (KA-Amdal, Andai RKL-RPL dan RKL-RPL, dan Adendum Andai, RKL-RPL) dan 30 kali pemeriksaan formulir UKL-UPL.

**2016** : 59 dokumen Amdal dan 10 formulir UKL-UPL.

**2017** : 50 Dokumen AMDAL, UKL-UPL dan Izin Lingkungan, 1 Sistem Penilaian Dokumen Lingkungan dan Penerbitan Izin Lingkungan secara Online

Gambar 20. Perkembangan Kegiatan Penyusunan dan Penilaian Amdal dan Pelaksanaan Evaluasi Kinerja terhadap KPA

Berdasarkan gambar 20, UKL-UPL mengalami penurunan jumlah dokumen yang diproses yaitu dari 30 dokumen menjadi 10 dokumen UKL-UPL tergantung dari pengajuan dokumen oleh pihak pemohon yang telah memenuhi persyaratan secara administrasi. Perencanaan tahun 2018 terdapat penurunan target 24 provinsi kegiatan pengembangan sistem pembinaan dan evaluasi kinerja KPA Amdal dan LPJP dikarenakan penyesuaian ketersediaan anggaran.

### III. RENCANA KERJA TAHUN 2018

---

#### A

#### Strategi dalam mendukung Prioritas Nasional Tahun 2018 melalui RKP Tahun 2018

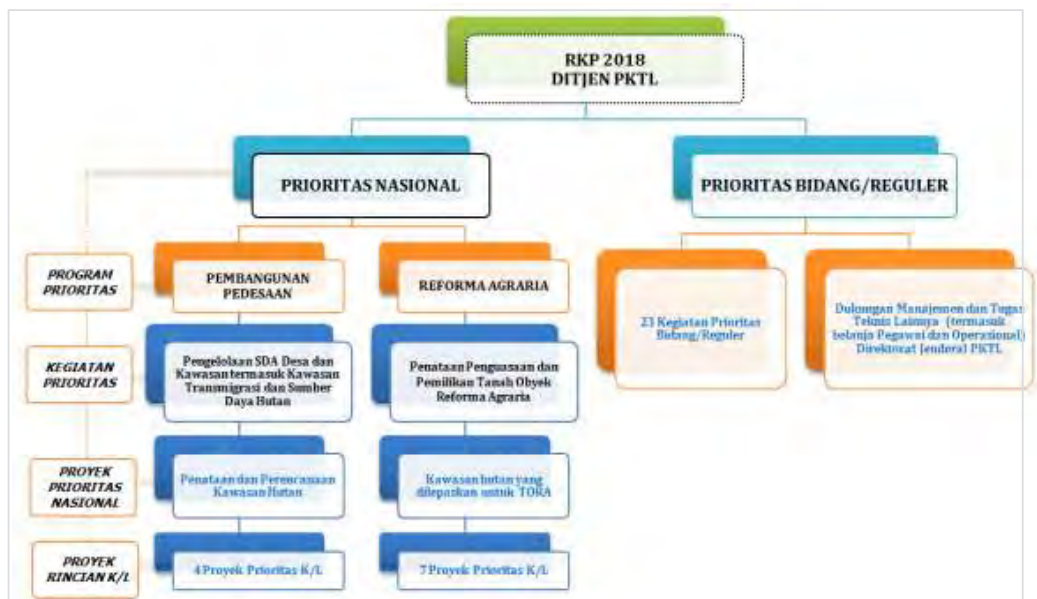
Sesuai dengan RPJMN Tahun 2015-2019, arah kebijakan yang terkait dengan peningkatan kualitas tata kelola hutan adalah mempercepat kepastian status hukum kawasan hutan yang dimulai dengan memberikan kejelasan status hukum (legal) sebuah kawasan hutan sesuai dengan UU No. 41/1999 dan Keputusan MK No. 45/2011, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, dan meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak diantaranya melalui pembentukan wilayah pengelolaan hutan hingga tingkat unit pengelola (KPH) serta memastikan pembagian peran regulator dan pelaksana (operator) dalam pengelolaan kawasan hutan. Terkait tata lingkungan, arah kebijakan dalam periode 2015-2019 adalah memastikan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah, dan penguatan instrumen pengelolaan lingkungan.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018 merupakan kelanjutan dari RKP tahun 2017 dimana keberhasilan pencapaian target pembangunan khususnya bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sampai dengan tahun 2018 akan menjadi salah satu penentu pencapaian target kumulatif lima tahun sesuai RPJMN tersebut diatas.

Pendekatan Penyusunan RKP 2018 dilakukan dengan perkuatan pelaksanaan kebijakan *Money Follow Program*. Penguatan tersebut dilaksanakan dengan pendekatan “**tematik, holistik, integratif, dan spasial**” dengan memperhatikan pada pengendalian perencanaan, perkuatan perencanaan dan penganggaran untuk RKP 2018, perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan, dan perkuatan integrasi sumber pendanaan.

Dalam RKP tahun 2018, juga telah ditetapkan 10 prioritas nasional yang terdiri dari berbagai program dan kegiatan prioritas nasional. Salah satu faktor yang menjadi penguatan dalam penyusunan RKP 2018 adalah adanya klasifikasi bidang/sector pada kegiatan prioritas, antara lain proyek prioritas nasional dan proyek prioritas bidang/reguler. Penetapan proyek prioritas nasional dipengaruhi oleh 3 kriteria yakni kelengkapan data, kelayakan dan kesiapan implementasi.

Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada tahun 2018 turut berperan dalam pencapaian pembangunan nasional terutama dalam prioritas nasional Pembangunan Wilayah khususnya program prioritas Pembangunan Perdesaan dan Reforma Agraria yang merupakan salah satu agenda prioritas nawa cita.



Gambar 21. Resume RKP Ditjen PKTL Tahun 2018

## **B Tujuan dan Arah Rencana Kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2018**

Rencana kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2018 memuat acuan dalam perencanaan kegiatan yang lebih "terarah, fokus dan strategis" serta memberikan gambaran seluruh kegiatan lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2018 baik kegiatan yang masuk ke dalam program prioritas nasional maupun prioritas bidang/reguler.

Sebagaimana tujuan utama pembangunan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019, tujuan Rencana Kerja Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2018 adalah *Memastikan Kawasan Hutan*

*yang Mantap dan Lingkungan yang Berkelanjutan Sebagai Prakondisi Pembangunan Nasional terutama untuk Memacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan, dengan arah kebijakan:*

1. Mempercepat pemantapan kawasan hutan, inventarisasi sumber daya hutan, penyelesaian tata batas kawasan hutan, percepatan penyelesaian pemetaan dan penetapan seluruh kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, integrasi perencanaan kawasan hutan, penyiapan prakondisi untuk meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak dan mempermudah perizinan yang jelas, cepat dan terukur, terutama dalam mendukung penyediaan lahan dan penyelesaian Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) di kawasan hutan.
2. Mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah.

Untuk mendukung tujuan dan arah kebijakan tersebut, Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan ditetapkan dengan output program dan indikator output program yang telah mendapat pencermatan dan penajaman mengikuti dinamika perubahan rencana pembangunan dalam RKP Tahun 2018 khususnya terkait dengan penyediaan sumber lahan untuk Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA).

Tabel 3. Output Program dan Indikator Output Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2018

Output Program	Indikator Output Program
<b>Luasan pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kawasan hutan yang telah ditetapkan</li> <li>2. Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk penyediaan sumber TORA</li> <li>3. Persentase penetapan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan</li> <li>4. Data dan peta TORA termuktahirkan</li> <li>5. Data dan peta obyek TORA dari kawasan hutan yang dilepaskan khususnya untuk perkebunan</li> </ol>
<b>Data dan informasi SDH</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data dan peta SDH Nasional</li> <li>2. Jumlah KPH yang telah memiliki data dan informasi potensi SDH</li> <li>3. Informasi geospasial tematik lingkungan hidup dan kehutanan mendukung KSP</li> <li>4. Data citra resolusi tinggi untuk pencapaian target Tanah Obyek Reforma Agraria</li> </ol>
<b>Produk kebijakan perencanaan, terkendalinya penggunaan kawasan hutan dan terbentuknya wilayah pengelolaan hutan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase penyelesaian permohonan penggunaan kawasan hutan yang memenuhi syarat dan ketentuan diproses penerbitan izinya sesuai peraturan yang berlaku</li> <li>2. Jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan KPH</li> <li>3. Jumlah provinsi yang memiliki peta arahan pemanfaatan hutan yang terupdate setiap tahun</li> <li>4. Jumlah KPH terintegrasi dalam RTRW</li> <li>5. Data dan informasi spasial dan dokumentasi pemanfaatan ruang kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah kawasan hutan</li> <li>6. Regulasi penataan ruang kawasan hutan</li> </ol>

Output Program	Indikator Output Program
	7. Data areal perhutanan sosial wilayah Jawa
<b>Produk kebijakan pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah KLHS zonasi wilayah pesisir layak dan terjamin kualitasnya berbasis daya dukung dan daya tampung</li> <li>2. Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DDDT</li> <li>3. Jumlah KLHS yang terreview kelayakannya</li> <li>4. Jumlah RPPLH Nasional yang tersusun (1 RPPLH Nasional),</li> <li>5. Jumlah Review RPPLH Nasional (1 Dokumen Midterm Review RPPLH Nasional, 1 Dokumen review 5 Tahunan)</li> <li>6. Jumlah RPPLH Provinsi yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah</li> <li>7. Jumlah RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah</li> <li>8. Jumlah penetapan indikasi daya dukung dan daya tampung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada ekoregion</li> <li>9. Jumlah satuan peta ekoregion</li> <li>10. Dokumen Neraca SDA LH dan PDRB Hijau Nasional Prov/Kab/Kota yang memiliki neraca SDA LH dan PDRB Hijau</li> </ol>
<b>Produk kebijakan pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah permohonan penilaian dokumen lingkungan terlayani sesuai dengan NSPK dan standar pelayanan publik</li> <li>2. Persentase sistem pengambilan keputusan kajian dampak lingkungan yang efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang berkualitas</li> <li>3. Jumlah KPA berlisensi dan pemeriksa UKL UPL daerah yang melakukan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sesuai dengan NSPK</li> </ol>
<b>Prakondisi pembangunan melalui pemantapan kawasan hutan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen berita acara tata batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA</li> <li>2. Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam Kawasan Hutan</li> <li>3. Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan</li> <li>4. Data dan informasi Sumber Daya Hutan (plot klaster TSP/PSP hasil inventarisasi kawasan hutan)</li> <li>5. Dokumen pengendalian pemantapan kawasan hutan</li> </ol>
<b>Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PKTL</b>	Nilai SAKIP tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal



## C

### Kegiatan dan Sasaran Kegiatan Tahun 2018

Berdasarkan RKP 2018, Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan berperan dalam pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional Pembangunan Wilayah, dengan program prioritas Pembangunan Pedesaan dan Reforma Agraria. Kegiatan-kegiatan dalam RKP 2018 telah disusun dengan memperhatikan rencana pembangunan tahun 2018 dan prioritas nasional yang telah ditetapkan. Secara umum, beberapa kegiatan yang masuk dalam prioritas nasional antara lain kegiatan Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan serta Penyiapan Pemantapan Kawasan Hutan. Kegiatan lain di luar prioritas nasional tersebut dalam RKP 2018 masuk dalam kegiatan prioritas bidang (kegiatan reguler).



Gambar 22. Proyek Prioritas K/L pada Ditjen PKTL 2018

Adapun program dan kegiatan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dijabarkan atas kegiatan, sasaran Kegiatan, output serta komponen kegiatan sebagaimana dijabarkan pada matriks berikut.

Tabel 4. Matriks Penjabaran Program dan Kegiatan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

No	Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	Output/ Sub Output	Komponen Kegiatan	Keterangan
<b>1</b>	<b>Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan</b>			
	Terselesaikannya penetapan kawasan hutan sebesar minimal 80% seluruh kawasan hutan	Kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan	Penelaahan substansi penetapan kawasan hutan. Pengendalian penataan batas kawasan hutan dalam rangka penetapan kawasan hutan	PP Pembangunan Pedesaan
	Terselesaikannya Seluruh Proses Permohonan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan	Draft SK Menteri tentang perubahan fungsi dan peruntukan bagi permohonan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku	Penelaahan dokumen permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan Penyelesaian SK Perubahan kawasan hutan	PP Bidang/Reguler
	Terselesaikannya pelepasan kawasan	Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	Pengendalian perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan Penyelesaian pelepasan kawasan hutan yang dilepaskan untuk	PP Reforma Agraria

No	Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	Output/ Sub Output	Komponen Kegiatan	Keterangan
	hutan untuk TORA		TORA	
	Termutakhirkannya data dan peta TORA	Data dan peta TORA yang mutakhir	Pemutakhiran data dan peta TORA di Kawasan Hutan	PP Reforma Agraria
	Terevaluasinya penyediaan 20% sebagai Obyek TORA dari kawasan hutan yang dilepaskan untuk perkebunan	Kawasan hutan yang dilepaskan khususnya untuk perkebunan yang telah dievaluasi	Evaluasi kawasan hutan yang dilepaskan khususnya untuk perkebunan (20% dari kawasan hutan yang dilepaskan untuk perkebunan)	PP Reforma Agraria
<b>2</b>	<b>Inventarisasi dan Pemantauan Sumber daya Hutan</b>			
		Data dan Peta SDH Nasional mendukung pengalokasian KH	Penyediaan Data dan Informasi Potensi SDH Nasional Penyelenggaraan Pemantauan SDH Nasional	PP Bidang/Reguler
	Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH Nasional dan KPH	Jumlah KPH yang telah memiliki data dan informasi potensi sumber daya hutan	Penyediaan Data dan Informasi Potensi Sumber daya Hutan KPH	PP Bidang/Reguler
		Informasi geospasial tematik lingkungan hidup dan kehutanan mendukung kebijakan satu peta ( <i>One Map Policy</i> )	Penyelenggaraan Pemetaan SDH Nasional Penyelenggaraan Sistem Informasi Geospasial LHK yang Terintegrasi dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional	PP Bidang/Reguler
	Terlaksananya penafsiran data citra resolusi tinggi untuk pencapaian target Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)	Penafsiran data citra resolusi tinggi untuk pencapaian target Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)	Penafsiran data citra resolusi tinggi untuk pencapaian target Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)	PP Reforma Agraria
<b>3</b>	<b>Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan</b>			
	Tersedianya Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH	Jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan KPH	Penyusunan Peta Penetapan dan fasilitasi Kelembagaan KPH	PP Pembangunan Pedesaan
		Forest Investment Program Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project	Forest Investment Program-Project 2 (FIP)	PP Bidang/Reguler
	Pembentukan Unit KPH serta penataan ruang wilayah 34 provinsi	Jumlah Provinsi yang memiliki peta arahan pemanfaatan hutan yang terupdate setiap tahun Jumlah KPH terintegrasi dalam rencana tata ruang wilayah	Penyusunan/update peta arahan pemanfaatan hutan mendukung KPH Pengendalian Penataan Ruang Kawasan Hutan mendukung KPH Penyusunan/penyempurnaan regulasi terkait penataan ruang kawasan hutan	pp Bidang/Reguler
		Jumlah KPH terintegrasi dalam RKTN, RKTP dan RKT	Pengendalian Perencanaan Makro Kawasan Hutan Mendukung KPH	
	Terlayannya permohonan penggunaan kawasan hutan khususnya dalam rangka ketahanan energi	Persentase permohonan penggunaan kawasan hutan yang memenuhi syarat dan ketentuan diproses penerbitan izinnya sesuai peraturan yang berlaku	Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan Verifikasi dan pemantauan Pembayaran PNBK Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%	PP Bidang/Reguler
	Tersedianya Data dan Informasi Spasial dan dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan	Data dan informasi Spasial dan Dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi, Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah	PP Bidang/Reguler

No	Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	Output/ Sub Output	Komponen Kegiatan	Keterangan
	Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan		Pengelolaan Hutan	
	Tersedianya data areal perhutanan sosial Jawa	Data areal perhutanan sosial Jawa	Penyediaan data areal perhutanan sosial Jawa	PP Reforma Agraria
<b>4</b>	<b>Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah Dan Sektor</b>			
	Terlaksananya analisis Lingkungan bagi rencana zonasi pesisir	Jumlah KLHS zonasi wilayah pesisir layak dan terjamin kualitasnya berbasis daya dukung dan daya tampung	Pengendalian dan Penjaminan kualitas KLHS rencana tata ruang laut nasional Pengendalian dan Penjaminan kualitas KLHS Rencana Zonasi Wilayah Pesisir	PP Bidang/Reguler
	Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas	Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis Daya Dukung Daya Tampung Jumlah KLHS yang tereview kelayakannya	Pengendalian kualitas KLHS berbasis daya dukung dan daya tampung sebanyak minimal 100 KLHS per tahun Review kelayakan KLHS sebanyak minimal 100 KLHS per tahun	pp Bidang/Reguler
	Tersusunnya RPPLH Nasional dan Daerah untuk menjadi acuan Rencana Pembangunan Daerah (Tertatanya pelestarian dan pemanfaatan SDA dan LH yang berkelanjutan)	Jumlah RPPLH Nasional yang tersusun, ditetapkan dan menjadi acuan pemerintah Jumlah RPPLH Provinsi yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah Jumlah RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	Penyusunan/penyempurnaan RPPLH Nasional Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi teknis penyusunan RPPLH Provinsi Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi teknis penyusunan RPPLH kab/kota	PP Bidang/Reguler
		Jumlah penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada setiap ekoregion	Penetapan dan update (pembaruan) indikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	PP Bidang/Reguler
		Jumlah satuan peta ekoregion pada skala 1:250.000	Penyusunan/penyempurnaan peta ekoregion pada skala 1:250.000	
	Tersusunnya Neraca SDA LH dan PDRB Hijau daerah sebagai input Neraca SDA LH dan PDB Hijau Nasional (Tersedia dan terbarukannya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup)	Jumlah Prov/Kab/Kota yang memiliki neraca SDA LH dan PDRB Hijau	Penyusunan neraca SDA LH, valuasi ekonomi SDA LH dan PDRB Hijau	PP Bidang/Reguler
<b>5</b>	<b>Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan</b>			
	Terseenggaranya sistem kajian dampak lingkungan yang efektif bagi usaha dan kegiatan dalam rangka pencegahan dampak lingkungan	Persentase permohonan penilaian dokumen lingkungan yang terlayani sesuai dengan NSPK dan standar pelayanan publik Sistem pengambilan keputusan kajian dampak lingkungan yang efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang berkualitas (100 Persen)	Penilaian dokumen AMDAL dan pemeriksaan UKL-UPL serta penerbitan izin lingkungan Pengembangan Sistem Pengambilan Keputusan Kajian Dampak Lingkungan dan Sistem Administrasi Permohonan Izin Lingkungan Pengembangan NSPK sistem kajian dampak lingkungan Pengembangan Sistem Dokumentasi Dokumen Lingkungan	PP Bidang/Reguler PP Bidang/Reguler



No	Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	Output/ Sub Output	Komponen Kegiatan	Keterangan
			Penilaian Audit Lingkungan dan Pelaksanaan Tindak Lanjut Permasalahan Dokumen Lingkungan	
		Jumlah KPA berlisensi dan pemeriksa UKL UPL daerah yang melakukan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sesuai dengan NSPK 250 daerah	Pengembangan Sistem Pembinaan dan Evaluasi Kinerja KPA AMDAL Daerah dan LPJP Pelaksanaan Bimtek dan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Kajian Dampak Lingkungan	PP Bidang/Reguler
<b>6</b>	<b>Pemantapan Kawasan Hutan</b>			
	Terlaksananya Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	Dokumen berita acara tata batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	PP Reforma Agraria
	Terinventarisasi dan terverifikasinya obyek TORA dalam kawasan hutan	Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan	Inventarisasi dan verifikasi Obyek TORA dalam Kawasan Hutan	PP Reforma Agraria
	Terselesaikannya rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan KPH	Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan	Fasilitasi rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan hutan KPH	PP Pembangunan Pedesaan
	Tersedianya data dan informasi Sumber Daya Hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi klaster TSP/PSP	Inventarisasi Sumber Daya Hutan	PP Pembangunan Pedesaan
	Terselenggaranya pengendalian pemantapan kawasan hutan	Dokumen pengendalian pemantapan kawasan hutan	Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan Penegasan Batas Kawasan Hutan	PP Bidang/Reguler
<b>7</b>	<b>Dukungan Manajemen (termasuk belanja pegawai dan operasional untuk seluruh program)</b>			
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) A (78 poin). Target tahun 2018 sebesar 77 poin /		
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019		Dokumen rencana dan anggaran Bidang PKTL	
		Perencanaan Program dan Anggaran, Data dan Informasi, Evaluasi dan Pelaporan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Monev dan Pelaporan Pelaksanaan rencana dan anggaran, serta penyajian kinerja Bidang PKTL	PP Bidang/Reguler
		Penyusunan Dokumen Prosedur Kerja, Administrasi Kepegawaian, Administrasi Jabfung dan Peningkatan Kualitas SDM Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Analisis Jabatan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Pengelolaan administrasi jabatan fungsional dan peningkatan kualitas SDM	PP Bidang/Reguler
		Penyusunan/ pembahasan rancangan Peraturan Perundangan, Penanganan Permasalahan Hukum dan Pengembangan Kerjasama Teknik Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Draft Peraturan Perundang-undangan bidang PKTL Penanganan permasalahan hukum bidang PKTL Pengembangan dan pemantauan kerjasama teknik bidang PKTL	PP Bidang/Reguler

No	Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	Output/ Sub Output	Komponen Kegiatan	Keterangan
			Laporan SIMAK-BMN	
			Laporan Keuangan Ditjen PKTL	
		Penyusunan Dokumen SIMAK-BMN, Laporan Keuangan dan BMN, Persuratan dan Pelayanan Umum	Sistem Digital Naskah Dinas, layanan penatausahaan dan persuratan	PP Bidang/Reguler
			Laporan Penyusunan Tindak Lanjut-LHP	
	Dukungan Manajemen kegiatan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019	Layanan perkantoran (operasional dan pemeliharaan kantor)	Layanan perkantoran (operasional dan pemeliharaan kantor)	
		Layanan Internal organisasi	Layanan Internal organisasi	PP Bidang/Reguler
		Layanan Internal (overhead)	Layanan Internal (overhead)	

## D Kinerja Kegiatan Tahun 2018

Target dan sasaran Rencana Kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2018 sesuai dengan target pembangunan nasional yang terkandung dalam agenda prioritas (Nawacita) dan RPJMN 2015 – 2019. Semua pihak diharapkan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan secara lebih terarah, fokus dan strategis sehingga mendukung tercapainya pelaksanaan sasaran tersebut. Kegiatan-kegiatan tersebut telah mengalami penajaman dan penguatan terutama terkait dengan TORA. Kegiatan dan Kinerja utama tahun 2018 Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dijabarkan dalam Tabel 5.

Tabel 5. Kegiatan dan Anggaran Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2018

No	Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Kinerja Utama Tahun 2018	Kebutuhan Anggaran (Milyar rupiah)
<b>1</b>	<b>Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan</b>		<b>66.996,108</b>
	Terselesaikannya penetapan kawasan hutan sebesar minimal 80% seluruh kawasan hutan	5% tambahan penetapan kawasan hutan di tahun 2018 di 22 BPKH	
	Terselesaikannya Seluruh Proses Permohonan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan	100 % bagi yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku)	
	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	1.630.421,00 Ha (deviasi 11%)	
	Termutakhirkannya data dan peta TORA	26 provinsi	
	Terevaluasinya penyediaan 20% sebagai Obyek TORA dari kawasan hutan yang dilepaskan untuk perkebunan	13 provinsi	
<b>2</b>	<b>Inventarisasi dan Pemantauan Sumber daya Hutan</b>		<b>9.608,605</b>
	Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi	- Data dan Informasi Potensi SDH	

No	Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Kinerja Utama Tahun 2018	Kebutuhan Anggaran (Milyar rupiah)
	SDH Nasional dan KPH	Nasional (34 Provinsi) - 100 KPH yang telah memiliki data dan informasi potensi SDH - Informasi geospasial tematik LHK mendukung Kebijakan Satu Peta ( <i>One Map Policy</i> ) pada 34 provinsi	
	Terlaksananya penafsiran data citra resolusi tinggi untuk pencapaian target Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)	33 Provinsi	
<b>3</b>	<b>Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan</b>		<b>45.089,110</b>
	Tersedianya Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH	92 KPH	
	Pembentukan Unit KPH serta penataan ruang wilayah 34 provinsi	34 Provinsi	
	Terlayannya permohonan penggunaan kawasan hutan khususnya dalam rangka ketahanan energi	100%	
	Tersedianya Data dan Informasi Spasial dan Dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	3 dokumen	
	Tersedianya data areal perhutanan sosial wilayah Jawa	Data areal perhutanan sosial pada 4 Provinsi regional Jawa	
<b>4</b>	<b>Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor</b>		<b>3.808,166</b>
	Terlaksananya analisis Lingkungan bagi rencana zonasi pesisir	5 KLHS RZWP3K	
	Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas	- 10 KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis Daya Dukung Daya Tampung - 15 KLHS yang tereview kelayakannya	
	Tersusunnya RPPLH Nasional dan Daerah untuk menjadi acuan Rencana Pembangunan Daerah (Tertatanya pelestarian dan pemanfaatan SDA dan LH yang berkelanjutan)	- 1 Dokumen RPPLH Nasional Provinsi - 5 Dokumen RPPLH Provinsi di Ekoregion Sulawesi - 10 Dokumen RPPLH Kab/Kota di Ekoregion Kalimantan - 1 indeks DD DT LH Nasional - 9 satuan peta ekoregion pada skala 1:250.000	
	Tersusunnya Neraca SDA LH dan PDRB Hijau daerah sebagai input Neraca SDA LH dan PDB Hijau Nasional (Tersedia dan terbarukannya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup)	- 2 Dokumen	
<b>3</b>	<b>Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan</b>		<b>3.905,953</b>
	Terselenggaranya sistem kajian dampak lingkungan yang efektif bagi usaha dan kegiatan dalam rangka pencegahan dampak lingkungan	- 100% permohonan penilaian dokumen lingkungan yang terlayani sesuai dgn NSPK dan standar pelayanan publik - 100% Sistem pengambilan keputusan kajian dampak lingkungan yang efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang berkualitas - 50 lembaga/instansi KPA berlisensi dan pemeriksa UKL UPL daerah yang melakukan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sesuai NSPK	

No	Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Kinerja Utama Tahun 2018	Kebutuhan Anggaran (Milyar rupiah)
<b>6</b>	<b>Pemantapan Kawasan Hutan</b>		<b>940.164,208</b>
	Terlaksananya Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	44.471 Km (termasuk Fasilitasi Penandaan Batas Perhutanan Sosial Wilayah Jawa sepanjang 1.000 Km)	
	Terinventarisasi dan terverifikasinya obyek TORA dalam kawasan hutan	26 Provinsi	
	Terpetakannya pemukiman, fasum fasos dalam kawasan hutan dalam rangka penyelesaian TORA di kawasan hutan	34 Provinsi	
	Terselesaikannya rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan KPH	65 KPH	
	Tersedianya data dan informasi Sumber Daya Hutan	179 klaster	
	Terselenggaranya pengendalian pemantapan kawasan hutan	100%	
<b>7</b>	<b>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PKTL</b>		<b>63.990,316</b>
	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019	SAKIP dengan nilai minimal 77,00 (A) di tahun 2018	

Dengan adanya percepatan penyelesaian penyediaan lahan untuk TORA, pada tahun 2018, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mengalami kenaikan target fisik dan kebutuhan anggaran. Pencapaian target kegiatan/kinerja tersebut, dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Ketersediaan dana anggaran.  
Kebutuhan anggaran pada Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mengalami peningkatan minimal mencapai 816 milyar Rupiah. Apabila ketersediaan dana anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan anggaran diatas, maka target kinerja tidak dapat tercapai 100%.
2. Peran aktif seluruh *stakeholder* terkait.  
Dukungan seluruh pihak baik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Daerah, para pihak terkait lainnya sangat diperlukan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

## IV. PENUTUP



Rencana Kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2018 merupakan acuan utama bagi seluruh Satuan Kerja lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2018.

Seluruh output kegiatan yang akan dituangkan dalam dokumen RKA Tahun 2018 harus berdasarkan kepada output-output kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan dan dituangkan di dalam dokumen Rencana Kerja ini. Dengan demikian, diharapkan seluruh alokasi dan pemanfaatan investasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang akan tertuang dalam DIPA TA. 2018, dapat lebih terarah dan lebih optimal dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya dalam mendukung penyediaan lahan dan penyelesaian Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) di kawasan hutan.

Komitmen untuk mengimplementasikan Rencana Kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2018 dan DIPA TA. 2018 selanjutnya dituangkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2018.

Lampiran 1. Matriks Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2018

Kegiatan / JKK / Output / Sub Output / Komponen	Sasaran Kegiatan	Target-Satuan	Alokasi (Juta/Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Nawacita	100 Janji Presiden	Dukungan (Tematik)	Kerangka Regulasi
<b>PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN</b>											
<i>Kawasan hutan yang ditetapkan</i>	Terselesainya penataan kawasan hutan sebesar minimal 80% seluruh kawasan hutan	5- (%) Persen	5.000.000		122-Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	24-Pembangunan Perdesaan	59-Pembangunan wilayah	05-Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Melalui Indonesia Prior, Indonesia Sehat, dan Indonesia Sejahtera		Bukan Tematik	Ya
Tanpa Sub Output		5- (%) Persen		Pusat							
Penelahaan substansi penetapan kawasan hutan.											
Pengendalian, penataan batas kawasan hutan dalam rangka penetapan kawasan hutan		22 BRKH									
<b>Solusi Perumahan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan diproses sesuai ketentuan yang berlaku</b>	Terselesainya Seluruh Proses Perumahan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan	100- (%) Persen	1.000.000								
Draft SK Menteri tentang perubahan fungsi dan peruntukan bagi perumahan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku											
Tanpa Sub Output											
Layanan Internal Organisasi		77 poin		Pusat		Bidang/Reguler				Bukan Tematik	Ya
Penelahaan dokumen permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan		100- (%) Persen									
Penyelesaian SK Perubahan kawasan hutan		1 Draft SK									
Pengendalian perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan		1 Jujur/Komponen									
<b>Luas Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk penyediaan sumber TORA</b>	Terselesainya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	1.630.421 Hektar	47.301.290		90-Penataan Pengawasan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria	25-Reforma Agraria	59-Pembangunan wilayah	05-Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Melalui Indonesia Sehat, Indonesia Sejahtera		Bukan Tematik	Ya
Tanpa Sub Output				Pusat							
Penyelesaian pelepasan kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA		1.630.421 Hektar									
<b>Data dan Peta TORA Termutakhirkan</b>	Termutakhirnya data dan peta TORA										
<b>Data dan peta TORA di kawasan Hutan yang mutakhir</b>		26-Provinsi	6.372.960		90-Penataan Pengawasan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria	25-Reforma Agraria	59-Pembangunan wilayah	05-Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Melalui Indonesia Sehat, Indonesia Sejahtera		Bukan Tematik	Tidak
Tanpa Sub Output				Pusat							
Pemutakhiran data dan peta TORA		26-Provinsi									
<b>Data dan Peta Objek TORA dari Kawasan Hutan yang dilepaskan khususnya untuk Perkebunan</b>	Terselesainya penyediaan 20% sebagai objek TORA dari kawasan hutan yang dilepaskan untuk perkebunan	13-Provinsi	5.650.209								
<b>Kawasan hutan yang dilepaskan khususnya untuk perkebunan yang telah dievaluasi</b>											
Tanpa Sub Out Put											
Evaluasi kawasan hutan yang dilepaskan khususnya untuk perkebunan (20% dari kawasan hutan yang dilepaskan untuk perkebunan)		13-Provinsi		Pusat	90-Penataan Pengawasan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria	25-Reforma Agraria	59-Pembangunan wilayah	05-Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Melalui Indonesia Sehat, Indonesia Sejahtera	068 - Redistribusi aset lahan (4,5 juta ha)	Bukan Tematik	Tidak

Kegiatan / IKK / Output / Sub Output / Komponen	Sasaran Kegiatan	Target-Satuan	Alokasi (Juta/Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Nawacita	100 Janji Presiden	Dukungan (Tematik)	Kerangka Regulasi
<b>Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Direktorat Pengkajian dan Penatagunaan kawasan hutan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin Layanan Internal (Overhead)</b>	08-Dukungan Manajemen kegiatan pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal. SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019	1-Layanan 1-Layanan 1-Layanan 1-Layanan	1.671,649	Pusat		Bidang/ Reguler				Bukan Tematik	Tidak
<b>Layanan Internal (Overhead)</b>											
Layanan Internal Overhead											
Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi											
Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran											
<b>Layanan Perkantoran</b>											
Tanpa Sub Output											
Operasional dan Pemeliharaan Kantor											Tidak
<b>INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN</b>											
<b>Data dan Peta SDH Nasional</b>			<b>9.608,605</b>								
<b>Data dan Peta SDH Nasional mendukung pengalokasian KH</b>	Tersedia dan termuatkannya data dan informasi SDH Nasional dan KPH	34-Provinsi	1.456,300	Pusat		Bidang/ Reguler				Bukan Tematik	Tidak
Tanpa Sub Out Put											
Penyediaan Data dan Informasi Potensi SDH Nasional											
Penyelenggaraan Pemantauan SDH Nasional											
<b>Jumlah KPH yang telah memiliki data dan informasi potensi sumberdaya hutan</b>			233,800								
Tanpa Sub Out Put											
Penyediaan Data dan Informasi Potensi Sumberdaya Hutan KPH											
<b>Informasi geospasial tematik lingkungan hidup dan kesehatan mendukung kebijakan satu peta (One Map Policy)</b>			1.935,400								
Tanpa Sub Out Put											
Layanan Internal Organisasi		77 poin									
Penyelenggaraan Pemetaan SDH Nasional		34-Provinsi								Bukan Tematik	Ya
Penyelenggaraan Sistem Informasi Geospasial LHK yang Terintegrasi dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional		34-Provinsi									
<b>Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal</b>	Dukungan Manajemen kegiatan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal. SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019	1-Layanan 1-Layanan 1-Layanan 1-Layanan	1.163,525	Pusat		Bidang/ Reguler				Bukan Tematik	Tidak
<b>Layanan Internal (Overhead)</b>											
Layanan Internal Overhead											
Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi											
Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran											
<b>Layanan Perkantoran</b>											
Tanpa Sub Output											
Operasional dan Pemeliharaan Kantor											Tidak

Kegiatan/ JKK/ Output/Sub Output/ Komponen	Sasaran Kegiatan	Target-Satuan	Alokasi (Juta/Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Nawacita	100 Janji Presiden	Dukungan (Tematik)	Kerangka Regulasi
<b>Data Citra Resolusi Tinggi untuk Pencapaian Target Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)</b>	Tertaksananya penafsiran data citra resolusi tinggi untuk pencapaian target Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)	33-Provinsi	4.819,580	Pusat	90-Penataan Peruntukan Tanah Obyek Reforma Agraria	25-Reforma Agraria	59-Pembangunan wilayah	05-Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Melalui, Inisiatif Prioritas Indonesia dan Indonesia Kerja dan Cita-cita Sejahtera		Bukan Tematik	Tidak
<b>Penafsiran data citra resolusi tinggi untuk pencapaian target Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)</b>	Penafsiran data citra resolusi tinggi untuk pencapaian target Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)	33-Provinsi									
<b>PERENCANAAN, PENGGUNAAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN</b>											
<b>Jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan KPH</b>	Tersedianya Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH	92-KPH	2.000,000	Pusat	122-Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transigrasi dan Sumber Daya Hutan	24-Pembangunan Pedesaan	59-Pembangunan wilayah			Bukan Tematik	Ya
<b>Jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan KPH</b>	Tanpa Sub Out Put	92-KPH									
<b>Forest Investment Program Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project</b>	Penyusunan Peta Penetapan dan Fasilitas Kelembagaan KPH	1-Laporan	34.198,284	Pusat		Bidang/Reguler				Bukan Tematik	Tidak
<b>Jumlah provinsi yang memiliki peta arahan pemanfaatan hutan yang terupdate setiap tahun</b>	Pembentukan Unit KPH serta penataan ruang wilayah 34 provinsi	34-Provinsi	370,000	Pusat		Bidang/Reguler				Bukan Tematik	Tidak
<b>Jumlah KPH terintegrasi dalam rencana tata ruang wilayah</b>	Tanpa Sub Out Put	34-Provinsi									
<b>Seluruh KPH terintegrasi dalam tata Ruang Wilayah, Regulasi penataan ruang kawasan hutan</b>	Penyusunan/Update peta arahan pemanfaatan hutan mendukung KPH	34-Provinsi	861,000	Pusat		Bidang/Reguler				Bukan Tematik	Ya
<b>Jumlah KPH terintegrasi dalam RKTN, RKTP dan RKTG</b>	Pengendalian Penataan Ruang Kawasan Hutan mendukung KPH	34-Provinsi									
<b>Jumlah KPH terintegrasi dalam RKTN, RKTP dan RKTG</b>	Penyusunan/penyempurnaan regulasi terkait penataan ruang kawasan hutan	34-Provinsi									
<b>Jumlah KPH terintegrasi dalam RKTN, RKTP dan RKTG</b>	Tanpa Sub Out Put	34-Provinsi	691,200	Pusat		Bidang/Reguler				Bukan Tematik	Ya
<b>Jumlah KPH terintegrasi dalam RKTN, RKTP dan RKTG</b>	Pengendalian Perencanaan Makro Kawasan Hutan Mendukung KPH	34-Provinsi									



Kegiatan / JKK/ Output/Sub Output/Komponen	Sasaran Kegiatan	Target-Satuan	Alokasi (Juta/Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Nawacita	100 Janji Presiden	Dukungan (Tematik)	Kerangka Regulasi
<b>Seluruh permohonan penggunaan kawasan hutan yang memenuhi syarat dan ketentuan proses penerbitan izinnya sesuai peraturan yang berlaku</b>	Terlindungnya permohonan penggunaan kawasan hutan khususnya dalam rangka ketahanan energi	100 (%) Persen	1.247,132	Pusat		Bidang/Reguler				Bukan Tematik	Ya
		100 (%) Persen									
		100 (%) Persen									
<b>Data dan informasi spasial dan dokumentasi pemanfaatan ruang kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan kawasan hutan</b>	Tersedianya Data dan Informasi Spasial dan dokumentasi pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Kawasan Hutan dan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	1 layanan	1.478.000	Pusat		Bidang/Reguler				Bukan Tematik	Tidak
<b>Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Rencana, Pengunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal</b>	Dukung Manajemen kegiatan rencana penggunaan dan pembentukan wilayah sosial kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019	1-Layanan 1-Layanan 1-Layanan 1-Layanan		Pusat		Bidang/Reguler				Bukan Tematik	Tidak
<b>Layanan Internal (Overhead)</b>											
<b>Layanan Internal Overhead</b>											
Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		1-Layanan		Pusat		Bidang/Reguler				Bukan Tematik	Tidak
Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran		1-Layanan									
<b>Layanan Perkantoran</b>			1.189.494								
Tanpa Sub Output		1-Layanan		Pusat							
Operasional dan Pemeliharaan Kantor		1-Layanan									
<b>Data areal perhutanan sosial Jawa</b>	Tersedianya data areal perhutanan sosial Jawa										
<b>Data areal perhutanan sosial Jawa</b>			3.054.000								
Tanpa Sub Output		4-Provinsi		Pusat	00-Penataan Pengawasan dan Pembinaan Blok Reformasi Agraria	25-Reforma Agraria	59-Pembangunan wilayah	05-Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Melalui, Inisiasip Prioritas dan Inisiasip Kesja dan Indonesia Sejahtera		Bukan Tematik	Tidak
Penyediaan data areal perhutanan sosial Jawa		4-Provinsi									

Kegiatan/ JKK/ Output/Sub Output/ Komponen	Sasaran Kegiatan	Target-Satuan	Alokasi (Juta/Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Nawacita	100 Janji Presiden	Dukungan (Tematik)	Kerangka Regulasi
<b>PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR</b>											
<b>Jumlah KLHS zonasi wilayah pesisir layak dan terjamin kualitasnya berbasis daya dukung dan daya tampung</b>	Tertaksananya analisis lingkungan bagi rencana zonasi pesisir		3.808,166								
<b>Jumlah KLHS zonasi wilayah pesisir layak dan terjamin kualitasnya berbasis daya dukung dan daya tampung</b>		5-KLHS RZWP3K	260,000	Pusat		Bidang/Reguler				Bukan Tematik	Ya
	Tanpa Sub Out Put	1 KLHS									
	Pengendalian dan Penjaminan kualitas KLHS rencana tata ruang laut nasional	5-KLHS RZWP3K									
	Pengendalian dan Penjaminan kualitas KLHS Rencana Zonasi Wilayah Pesisir										
<b>Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT sebanyak minimal 100 KLHS per tahun</b>	Tertaksananya analisis lingkungan bagi semua RTW, RP, RPJMN dan KRP										
<b>Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis Daya Dukung Daya Tampung</b>	Prioritas	10-KLHS	421,900								
	Tanpa Sub Out Put										
	Pengendalian kualitas KLHS berbasis daya dukung dan daya tampung sebanyak minimal 100 KLHS per tahun	10-KLHS		Pusat		Bidang/Reguler				Bukan Tematik	Ya
<b>Jumlah KLHS yang terreview kelayakannya sebanyak minimal 100 KLHS per tahun</b>											
<b>Jumlah KLHS yang terreview kelayakannya</b>											
	Tanpa Sub Out Put										
	Review kelayakan KLHS sebanyak minimal 100 KLHS per tahun	15-KLHS	337,900	Pusat		Bidang/Reguler				Bukan Tematik	Ya
<b>Jumlah RPPH Nasional yang tersusun (1 RPPH Nasional), Jumlah RPPH Provinsi Nasional (1 Dokumen Modern Revisi RPPH Nasional), 1 Dokumen Revisi 5 Tahunan)</b>	Tersusunnya RPPH Nasional dan Daerah untuk menjadi acuan Rencana										
	Pembangunan Daerah (Tertatanya pelaksanaan dan pemanfaatan SDA dan LH yang berkelanjutan)	1-Dokumen	200,100	Pusat		Bidang/Reguler				Bukan Tematik	Ya
<b>Jumlah RPPH Nasional yang tersusun, ditetapkan dan menjadi acuan pemerintah</b>		1-Dokumen									
	Tanpa Sub Out Put										
	Penyusunan/penyempurnaan RPPH Nasional										
<b>Jumlah RPPH Provinsi yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah</b>											
	Tanpa Sub Out Put										
	Facilitasi, Bimbingan dan Asistensi teknis penyusunan RPPH Provinsi	5-Provinsi	143,000	Pusat		Bidang/Reguler				Bukan Tematik	Ya
<b>Jumlah RPPH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah</b>											
	Tanpa Sub Out Put										
	Facilitasi, Bimbingan dan Asistensi teknis penyusunan RPPH kab/kota	10-Kab/Kota	152,100	Pusat		Bidang/Reguler				Bukan Tematik	Ya

Kegiatan / JKK / Output / Sub Output / Komponen	Sasaran Kegiatan	Target-Satuan	Alokasi (Juta/Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Nawacita	100 Janji Presiden	Dukungan (Tematik)	Kerangka Regulasi
<b>Jumlah penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada setiap ecoregion</b>	Tanpa Sub Out Put	1-Indeks	495.000	Pusat		Bidang/Reguler				Bukan Tematik	Ya
		1-Indeks									
<b>Jumlah satuan peta ecoregion pada skala 1:250.000</b>	Tanpa Sub Out Put	9-Satuan Peta	495.000	Pusat		Bidang/Reguler				Bukan Tematik	Ya
		9-Satuan Peta									
<b>Neraca SDA LH dan PDRB Hijau Nasional Prov/Kab/Kota yang memiliki neraca SDA LH dan PDRB Hijau</b>	Tersusnya Neraca SDA LH dan PDRB Hijau daerah sebagai Input Neraca SDA LH dan PDRB Hijau Nasional (Tersedia dan terbarukannya data dan informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup)	2-Dokumen	495.000	Pusat		Bidang/Reguler				Bukan Tematik	Tidak
		77 poin									
<b>Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal</b>	Dukungan Manajemen kegiatan pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal. SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019	2-Dokumen									
		1-Layanan									
<b>Layanan Internal (Overhead)</b>	Layanan Internal Overhead	1-Layanan		Pusat		Bidang/Reguler				Bukan Tematik	Tidak
		1-Layanan									
<b>Layanan Perkantoran</b>	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1-Layanan	808.166			Bidang/Reguler				Bukan Tematik	Tidak
		1-Layanan									
<b>PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN</b>	Terselenggaranya sistem kajian dampak lingkungan yang efektif bagi usaha dan kegiatan dalam rangka pencegahan dampak lingkungan	1-Layanan	<b>3.905,953</b>								
		100-Person	1.019.900								
<b>Persentase pemohonan penilaian dokumen lingkungan yang terlayani sesuai dengan NSPK dan standar pelayanan publik</b>	Tanpa Sub Out Put	50 Dokumen		Ases		Bidang/Reguler				Bukan Tematik	Tidak

Kegiatan/ JKK/ Output/Sub Output/ Komponen	Sasaran Kegiatan	Target-Satuan	Alokasi (Juta/Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Nawacita	100 Janji Presiden	Dukungan (Tematik)	Kerangka Regulasi
Pengembangan Sistem Pengambilan Keputusan Kajian Dampak Lingkungan dan Sistem Administrasi Pemohonan Izin Lingkungan		1 sistem									
<b>Sistem pengambilan keputusan kajian dampak lingkungan yang efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang berkualitas (100 Persen)</b>		100-Persen	675.000								
Tanpa Sub Out Put											
Pengembangan NSPK sistem kajian dampak lingkungan		1 Dokumen		Pusat		Bidang/Reguler				Bukan Tematik	Ya
Pengembangan Sistem Dokumentasi Dokumen Lingkungan		1 sistem									
Penilaian Audit Lingkungan dan Pelaksanaan Tindak Lanjut Permasalahan Dokumen Lingkungan		1 Dokumen									
<b>Jumlah KPA berlisensi dan pemeriksa UKL UPL daerah yang melakukan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sesuai dengan NSPK 250 daerah</b>											
Tanpa Sub Out Put		50-Lembaga/Instansi	1.305.100								
Peralatan dan Mesin		1 layanan									
Layanan Internal Organisasi		77 poin		Pusat		Bidang/Reguler				Bukan Tematik	
Pengembangan Sistem Pembinaan dan Evaluasi Kinerja KPA AMDAL Daerah dan LPJP		24 provinsi									
Pelaksanaan Blimtek dan Monitoring/Evaluasi Pelaksanaan Kajian Dampak Lingkungan		50-Lembaga/Instansi									
<b>Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal</b>											
Layanan Internal (Overhead)	Dukungan										
Layanan Internal Overhead	Manajemen kegiatan										
Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	pengecambahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal. SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019	1-Layanan									
Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Kegiatan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal. SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019	1-Layanan	905.953								
Tanpa Sub Output											
Operasional dan Pemeliharaan Kantor		1-Layanan		Pusat		Bidang/Reguler				Bukan Tematik	Tidak
<b>PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN</b>			<b>940.164.208</b>								
<b>Dokumen berita acara tata batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA</b>	Terlaksananya Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA										
Dokumen berita acara tata batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA		44.471 km	346.482.872								
Tanpa Sub Output											
Peralatan dan Mesin		1 layanan		33 Provinsi	90-Pertanian Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek	25-Retorna Agraria	59-Pembangunan wilayah	05-Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Melalui Indonesia Prior. Indonesia Sehat, Indonesia		Bukan Tematik	Tidak

Kegiatan / JKK / Output / Sub Output / Komponen	Sasaran Kegiatan	Target-Satuan	Alokasi (Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Nawacita	100 Janji Presiden	Dukungan (Tematik)	Kerangka Regulasi
Layanan Internal Organisasi		1 layanan			Reforma Agraria			Kerja dan Indonesia Sejahtera			
Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA		44.471 km									
<b>Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam Kawasan Hutan</b>	Terinventarisasi dan tervalidasi obyek TORA dalam kawasan hutan										
<b>Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan</b>		26-Provinsi	412.411,489	26-Provinsi	99-Pencapaian Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria	25-Reforma Agraria	59-Pembangunan wilayah	05-Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Indonesia Sehat, Indonesia Sejahtera dan Indonesia Berkeadilan (4.5 Juhah)	068 - Redistribusi aset lahan (4.5 Juhah)	Bukan Tematik	Tidak
Tanpa Sub Output											
Inventarisasi dan verifikasi Obyek TORA dalam Kawasan Hutan		26-Provinsi									
<b>Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan</b>	Tersesalkannya rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan KPH	65-KPH	31.419.000	23 Provinsi	122-Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transigrasi dan Sumber Daya Hutan	24-Pembangunan Perdesaan	59-Pembangunan wilayah			Bukan Tematik	
<b>Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan</b>		65-KPH									
Tanpa Sub Out Put											
Fasilitas rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan hutan KPH											
<b>Data dan informasi Sumber Daya Hutan (plot klaster TSP/PSP hasil inventarisasi kawasan hutan)</b>	Tersedianya data dan informasi Sumber Daya Hutan	179-Klaster	10.562.000	24 Provinsi	122-Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transigrasi dan Sumber Daya Hutan	24-Pembangunan Perdesaan	59-Pembangunan wilayah			Bukan Tematik	
<b>Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi klaster TSP/PSP</b>											
Tanpa Sub Out Put											
Inventarisasi Sumber Daya Hutan		179-Klaster									
<b>Terkendalinya Pemantapan Kawasan Hutan</b>											
<b>Dokumen pendendalian pemantapan kawasan hutan</b>	Terselenggaranya pendendalian pemantapan kawasan hutan	16 Lokasi	1.727.884								
Tanpa Sub Out Put											
Layanan Internal Organisasi		100-Person		12 Provinsi		Bidang/Reguler				Bukan Tematik	Tidak
Verifikasi PNPB penggunaan Kawasan Hutan		18 Lokasi/zitn PKH									
Pengawasan Batas Kawasan Hutan		16 Lokasi									
<b>Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal</b>	Tertaksananya dukungan manajemen kegiatan pemantapan kawasan hutan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal. SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019	1-Layanan									
<b>Layanan Internal (Overhead)</b>											
Tanpa Sub Out Put											
Pengadaan Kendaraan Bermotor		1-Layanan		22 BPKH		Bidang/Reguler				Bukan Tematik	Tidak
Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		1-Layanan									
Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran		1-Layanan									
Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan		1-Layanan									
<b>Layanan Perkantoran</b>											
Tanpa Sub Out Put											
Geji dan Tunjangan		1-Layanan	137.560.963								
Operasional dan Pemeliharaan Kantor		1-Layanan		22 BPKH		Bidang/Reguler				Bukan Tematik	Tidak

Kegiatan/ JKK/ Output/Sub Output/ Komponen	Sasaran Kegiatan	Target-Satuan	Alokasi (Juta/Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Nawacita	100 Janji Presiden	Dukungan (Tematik)	Kerangka Regulasi
<b>DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA SEKRETARIAT DIJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN</b>											
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Dijen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal. SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019											
<b>Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Dijen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai kerangka Reformasi Birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal</b>		77- Poin	7.640,445								
<b>Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) A (78 poin). Target tahun 2018 sebesar 77 poin</b>											
Perencanaan Program dan Anggaran, Data dan Informasi, Evaluasi dan Pelaporan Dijen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan											
Dokumen rencana dan anggaran Bidang PKTL		4 Dokumen/layanan									
Monev dan Pelaporan Pelaksanaan rencana dan anggaran, serta penyajian kinerja Bidang PKTL		6 Dokumen/layanan									
Layanan data dan informasi, statistik dan kehumasan bidang PKTL		3 Dokumen/layanan									
Penyusunan Dokumen Prosedur Kerja, Administrasi Kepegawalan, Administrasi Jabtung dan Peningkatan Kualitas SDM Dijen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan											
Analisis Jabatan Dijen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan		1 Dokumen/layanan									
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawalan		1 Dokumen/layanan									
Pengelolaan administrasi jabatan fungsional dan peningkatan kualitas SDM		1 Dokumen/layanan		Pusat		Bidang/Reguler				Bukan Tematik	Tidak
Penyusunan/ pembahasan rancangan Peraturan Perundangan, Penanganan Pemeliharaan Hukum dan Pengembangan Kerjasama Teknik Dijen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan											
Draft Peraturan Perundang-undangan bidang PKTL		5 Dokumen									
Penanganan permasalahan hukum bidang PKTL		2 Dokumen/layanan									
Pengembangan dan pemantauan kerjasama teknik bidang PKTL		3 Dokumen/layanan									
Penyusunan Dokumen SIMAK BMN, Laporan Keuangan dan BMN, Persuratan dan Pelayanan Umum											
Layanan Internal Organisasi											
Laporan SIMAK-BMN		3 Dokumen/layanan									
Laporan Keuangan Dijen PKTL		3 Dokumen/layanan									
Sistem Digital Naskah Dinas, layanan penatausahaan dan persuratan		1 Dokumen/layanan									
Laporan Penyusunan Tindak Lanjut-LHP		1 Dokumen/layanan									
<b>Layanan Internal (Overhead)</b>		1-Layanan	378,901								
Layanan Internal Overhead											
Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		1-Layanan		Pusat						Bukan Tematik	Tidak
Pengadaan Peralihan dan Fasilitas Perkantoran		1-Layanan									
<b>Layanan Perkantoran</b>											
Tanpa Sub Output		1-Layanan	55-970,970								
Gejri dan Tunjangan		1-Layanan									
Operasional dan Pemeliharaan Kantor		1-Layanan									

## Lampiran 2. Matriks Rangkuman Kegiatan Rinci pada Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2018

Kegiatan/Output/Sub Output/Komponen	Kegiatan Rinci
<b>PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN</b>	
<b>Kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan</b>	
Tanpa Sub Output	
Penelaahan substansi penetapan kawasan hutan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelaahan Dan Pembahasan Peta Usulan Penetapan Kawasan Hutan</li> <li>• Uji Petik Pelaksanaan Tata Batas Kawasan Hutan</li> <li>• Penyajian Peta Penetapan Kawasan Hutan</li> </ul>
Pengendalian penataan batas kawasan hutan dalam rangka penetapan kawasan hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring Tata Batas Kawasan Hutan</li> <li>• Bimbingan Teknis Pengukuhan Kawasan Hutan</li> <li>• Pengesahan BATB</li> <li>• Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Kawasan Hutan</li> <li>• Pemutakhiran Peta Kawasan Hutan</li> <li>• Pemutakhiran Data Deliniasi Batas IUPHHK</li> </ul>
<b>Draft SK Menteri tentang perubahan fungsi dan peruntukan bagi permohonan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku</b>	
Tanpa Sub Output	
Layanan Internal Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan manajemen organisasi</li> <li>• Pengelolaan Kesekretariatan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan KH</li> </ul>
Penelaahan dokumen permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengumpulan Bahan Dan Data Permohonan Perubahan Fungsi Dan Peruntukan Kawasan Hutan Termasuk Pada Lokasi Pemukiman Transmigrasi</li> <li>• Penelaahan Permohonan Perubahan Fungsi Dan Peruntukan Kawasan Hutan Termasuk Pada Lokasi Pemukiman Transmigrasi</li> </ul>
Penyelesaian SK Perubahan kawasan hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelesaian Permasalahan Perubahan Fungsi Dan Peruntukan Kawasan Hutan Termasuk Pada Lokasi Pemukiman Transmigrasi</li> <li>• Penyiapan Bahan Keputusan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan</li> </ul>
Pengendalian perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Perubahan Fungsi Dan Peruntukan Kawasan Hutan Termasuk Pada Lokasi Pemukiman Transmigrasi</li> </ul>
<b>Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA.</b>	
Tanpa Sub Output	
Penyelesaian pelepasan kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengkajian Dan Pengesahan Hasil Inver Dalam Rangka Penerbitan Perintah Tata Batas</li> <li>• Penyiapan Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan (Perubahan Tata Batas Kawasan Hutan) Dalam Rangka TORA</li> <li>• Persiapan Kegiatan Tim Terpadu Untuk Penyelesaian TORA</li> <li>• Persiapan Kajian Tim Terpadu Untuk Penyelesaian TORA</li> <li>• Pelaksanaan Tim Terpadu Untuk Penyelesaian TORA</li> <li>• Pembahasan Tim Terpadu Untuk Penyelesaian TORA</li> <li>• Penyelesaian Kajian Tim Terpadu Untuk Penyelesaian TORA</li> <li>• Evaluasi Kegiatan Tim Terpadu Untuk Penyelesaian TORA</li> <li>• Pengadaan Barang untuk menunjang Kegiatan TORA , kegiatan Timdu TORA dan kegiatan TORA Pusat; Pengadaan Barang untuk Pemutakhiran Data TORA; dan Pengadaan Barang Pendukung Arsip Pengukuhan</li> </ul>
<b>Data dan peta TORA di Kawasan Hutan yang mutakhir</b>	
Tanpa Sub Output	
Pemutakhiran data dan peta TORA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengolahan Informasi dan Peta TORA di Kawasan Hutan</li> <li>• Pengelolaan Dokumen dan Peta TORA Kawasan Hutan</li> <li>• Sosialisasi Data dan Peta TORA</li> </ul>
<b>Kawasan hutan yang dilepaskan khususnya untuk perkebunan yang telah dievaluasi</b>	
Tanpa Sub Out Put	
Evaluasi kawasan hutan yang dilepaskan khususnya untuk perkebunan (20% dari kawasan hutan yang dilepaskan untuk perkebunan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persiapan</li> <li>• Forum FGD di provinsi</li> <li>• Pembahasan Hasil FGD Provinsi</li> <li>• Rapat Koordinasi FGD</li> </ul>
<b>Layanan Internal (Overhead)</b>	
Layanan Internal Overhead	
Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
<b>Layanan Perkantoran</b>	
Tanpa Sub Output	
Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan perkantoran (operasional dan pemeliharaan kantor)

Kegiatan/Output/Sub Output/Komponen	Kegiatan Rinci
<b>INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN</b>	
<b>Data dan Peta SDH Nasional mendukung pengalokasian KH</b>	
Tanpa Sub Out Put	
Penyediaan Data dan Informasi Potensi SDH Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan NSDH Nasional</li> <li>• Penyusunan peraturan bidang inventarisasi hutan</li> <li>• Pengendalian Teknis Inventarisasi Hutan Nasional</li> <li>• Monitoring dan Evaluasi Penyusunan NSDH Provinsi</li> <li>• Uji Petik Kegiatan Inventarisasi Hutan Nasional</li> <li>• Penghitungan Potensi Sumber Daya Hutan Nasional</li> <li>• Pembuatan Peta NSDH</li> </ul>
Penyelenggaraan Pemantauan SDH Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi Teknis Pemantauan Sumber Daya Hutan Nasional</li> <li>• Pengelolaan Basis Data Citra Penginderaan Jauh</li> <li>• Update data penutupan lahan tingkat nasional</li> <li>• Kompilasi Hasil Update Data Penutupan Lahan dalam rangka Pemantauan SDH</li> <li>• Penelaahan Penutupan Lahan pada IUPHHK-HA/HT dengan Citra Resolusi Sedang/Tinggi</li> <li>• Update Penafsiran KPH</li> <li>• Inhouse Training Bidang IPSDH</li> </ul>
<b>Jumlah KPH yang telah memiliki data dan informasi potensi sumberdaya hutan</b>	
Tanpa Sub Out Put	
Penyediaan Data dan Informasi Potensi Sumberdaya Hutan KPH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bimbingan Teknis Inventarisasi Hutan Tingkat Unit Pengelolaan (KPH)</li> <li>• Penyediaan Data dan Informasi Potensi SDH KPH</li> </ul>
<b>Informasi geospasial tematik lingkungan hidup dan kehutanan mendukung kebijakan satu peta (One Map Policy)</b>	
Tanpa Sub Out Put	
Layanan Internal Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Rencana Kegiatan Inventarisasi SDH</li> <li>• Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya</li> <li>• Koordinasi Kegiatan bidang Inventarisasi dan Pemantauan SDH</li> </ul>
Penyelenggaraan Pemetaan SDH Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia</li> <li>• Penghitungan Deforestasi Indonesia</li> <li>• Penelaahan Peta Tematik Kehutanan</li> <li>• Dokumentasi Data dan Peta</li> <li>• Sosialisasi Teknis Pemetaan Sumber Daya Hutan</li> <li>• Pemetaan Areal Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut</li> </ul>
Penyelenggaraan Sistem Informasi Geospasial LHK yang Terintegrasi dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan Basis Data Spasial LHK</li> <li>• Pengelolaan Jaringan Data Spasial</li> <li>• Pengoperasian dan pemeliharaan Microlight Trike</li> <li>• Koordinasi dalam rangka Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta</li> </ul>
<b>Layanan Internal (Overhead)</b>	
Layanan Internal Overhead	
Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
<b>Layanan Perkantoran</b>	
Tanpa Sub Output	
Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan perkantoran (operasional dan pemeliharaan kantor)
<b>Penafsiran data citra resolusi tinggi untuk pencapaian target Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)</b>	
Tanpa Sub Output	
Penafsiran data citra resolusi tinggi untuk pencapaian target Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan dan Pengolahan Data Awal Citra Resolusi Tinggi</li> <li>• Penafsiran Citra Satelit Resolusi Tinggi</li> <li>• Pengadaan Barang Pendukung Penyediaan dan Pengolahan Data Citra Resolusi Tinggi untuk mendukung TORA</li> </ul>
<b>PERENCANAAN, PENGGUNAAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN</b>	
<b>Jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan KPH</b>	
Tanpa Sub Out Put	
Penyusunan Peta Penetapan dan fasilitas Kelembagaan KPH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelaahan dan Pembahasan Usulan Penetapan KPH</li> <li>• Penyajian Peta Penetapan KPH</li> <li>• Penyusunan Substansi Peraturan Perundangan Prakondisi Pembangunan KPH</li> <li>• Pemantauan Proses Pembangunan KPH Pasca Pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2014</li> <li>• Peningkatan Kapasitas SDM dalam rangka Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan</li> </ul>
<b>Forest Investment Program Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project</b>	
Tanpa Sub Output	



Kegiatan/Output/Sub Output/Komponen	Kegiatan Rimci
Forest Investment Program-Project 2 (FIP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan efektivitas pelaksanaan pengukuhan dan penggunaan lahan dalam dan sekitar KPH</li> <li>• Pengembangan mekanisme pembiayaan untuk menyediakan dana nasional seperti APBN dan atau APBD setempat untuk membiayai KPH</li> <li>• Perbaikan dan perubahan peraturan pemerintah untuk penggunaan keuangan negara</li> <li>• Pengembangan kebijakan di tingkat masyarakat</li> <li>• Pengembangan kebijakan di tingkat masyarakat</li> <li>• Pengembangan sistem monitoring dan pelaporan pada semua pemegang lisensi</li> <li>• Penetapan KPH sebagai PPK BLUD</li> <li>• Pengembangan kapasitas perencanaan ruang di tingkat nasional dan daerah</li> <li>• Persiapan metodologi dan petunjuk teknis uuntuk penyiapan perencanaan di KPH</li> <li>• Pengembangan SDM KPH dan kapasitas perencanaan pengelolaan</li> <li>• Biaya operasional untuk unit pendukung di tingkat tapak</li> <li>• Implementasi Proyek</li> </ul>
<b>Jumlah Provinsi yang memiliki peta arahan pemanfaatan hutan yang terupdate setiap tahun</b>	
Tanpa Sub Out Put	
Penyusunan/update peta arahan pemanfaatan hutan mendukung KPH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan/Update Peta Arahan Pemanfaatan Hutan Mendukung KPH, 34 Provinsi</li> <li>• Monitoring dan evaluasi arahan pemanfaatan hutan (Koordinasi/Penyiapan/Monitoring/Bimbingan Teknis KHDTK)</li> </ul>
<b>Jumlah KPH terintegrasi dalam rencana tata ruang wilayah</b>	
Tanpa Sub Out Put	
Pengendalian Penataan Ruang Kawasan Hutan mendukung KPH	Pengintegrasian Rencana Ruang Kawasan Hutan ke dalam RTRW Berbasis 600 KPH/ Penyusunan Rencana Kawasan Hutan
Penyusunan/ Penyempurnaan regulasi terkait penataan ruang kawasan hutan	Penyusunan/ Penyempurnaan regulasi terkait penataan ruang kawasan hutan
<b>Jumlah KPH terintegrasi dalam RKTN, RKTP dan RKTK</b>	
Tanpa Sub Out Put	
Pengendalian Perencanaan Makro Kawasan Hutan Mendukung KPH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengintegrasian RKTN dengan KPH</li> <li>• Penyempurnaan sistem perencanaan kehutanan</li> <li>• Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi</li> </ul>
<b>Pemohonan penggunaan kawasan hutan yang memenuhi syarat dan ketentuan diproses penerbitan izinnya sesuai peraturan yang berlaku</b>	
Tanpa Sub Out Put	
Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelaahan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan</li> <li>• Klarifikasi Permasalahan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan</li> <li>• Peningkatan Pemenuhan Kewajiban Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan</li> <li>• Supervisi Monitoring/Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan</li> <li>• Klarifikasi Pemenuhan Kewajiban Lahan Kompensasi</li> </ul>
Verifikasi dan pemantauan Pembayaran PNBK Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bimbingan Teknis Penyusunan Kelengkapan Dokumen PNBK</li> <li>• Monitoring Pembayaran PNBK PKH ( 6 Provinsi) .Laporan Hasil Monitoring Pembayaran PNBK-PKH, 12 Judul</li> <li>• Supervisi Verifikasi PNBK PKH, 6 lokasi, Laporan Hasil Supervisi Verifikasi PNBK-PKH, 6 Judul</li> <li>• Pengembangan Aplikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan</li> </ul>
<b>Data dan informasi Spasial dan Dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan</b>	
Tanpa Sub Out Put	
Layanan Internal Organisasi	Layanan Internal organisasi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi SI IPPKH</li> <li>• Supervisi Laporan Pemenuhan Kewajiban Pemegang IPPKH</li> <li>• Update Data dan Informasi Penggunaan Kawasan Hutan, 34 Provinsi</li> <li>• Pengolahan dan Analisis Data Kondisi Penggunaan Kawasan Hutan</li> <li>• Publikasi Penggunaan Kawasan Hutan</li> <li>• Konfirmasi Lokasi Permohonan IPPKH</li> <li>• Penataan Arsip Pada Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan</li> <li>• Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan KPH</li> <li>• Pengembangan Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi KPH</li> <li>• Optimalisasi Pengembangan Pemanfaatan Sinpasdok KPH +</li> <li>• Penyelenggaraan Publikasi KPH</li> <li>• Pengintegrasian Data dan Informasi Tematik Kehutanan (KHDTK, Penggunaan Kawasan Hutan, dan KPH) ke dalam Peta Dasar RBI skala 1 : 50.000 (dalam rangka mendukung Kebijakan Satu Peta/One Map Policy)</li> <li>• Analisis dan Penyiapan Data dan Informasi Tematik Kehutanan (KHDTK, Penggunaan Kawasan Hutan, dan KPH) ke dalam Peta Dasar RBI skala 1 : 50.000 (dalam rangka mendukung Kebijakan Satu Peta/One Map Policy)</li> </ul>
<b>Layanan Internal (Overhead)</b>	
<b>Layanan Internal Overhead</b>	
Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Kegiatan/Output/Sub Output/Komponen	Kegiatan Rimci
Komunikasi	
Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
<b>Layanan Perkantoran</b>	
Tanpa Sub Output	
Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan perkantoran (operasional dan pemeliharaan kantor)
<b>Data areal perhutanan sosial Jawa</b>	
Tanpa Sub Output	
Penyediaan data areal perhutanan sosial Jawa	Penyediaan Data Areal Perhutanan Sosial Jawa
<b>PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR</b>	
<b>Jumlah KLHS zonasi wilayah pesisir layak dan terjamin kualitasnya berbasis daya dukung dan daya tampung</b>	
Tanpa Sub Out Put	
Pengendalian dan Penjaminan kualitas KLHS rencana tata ruang laut nasional	
Pengendalian dan Penjaminan kualitas KLHS Rencana Zonasi Wilayah Pesisir	Fasilitasi dan Bimbingan Teknis KLHS RZWP3K (Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Bali, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Sumatera)
<b>Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis Daya Dukung Daya Tampung</b>	
Tanpa Sub Out Put	
Pengendalian kualitas KLHS berbasis daya dukung dan daya tampung sebanyak minimal 100 KLHS per tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas Dan Bimbingan Teknis KLHS Daerah (Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Bali, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Sumatera)</li> <li>• Validasi Kelayakan KLHS Daerah</li> </ul>
<b>Jumlah KLHS yang tereview kelayakannya</b>	
Tanpa Sub Out Put	
Review kelayakan KLHS sebanyak minimal 100 KLHS per tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Validasi Kelayakan Sektor (Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Bali, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Sumatera)</li> <li>• Validasi kelayakan KLHS Provinsi</li> </ul>
<b>Jumlah RPPLH Nasional yang tersusun, ditetapkan dan menjadi acuan pemerintah</b>	
Tanpa Sub Out Put	
Penyusunan/penyempurnaan RPPLH Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup nasional</li> <li>• Penyusunan arahan implementasi RPPLH nasional</li> <li>• Fasilitasi, bimbingan dan asistensi teknis urusan RPPLH nasional</li> </ul>
<b>Jumlah RPPLH Provinsi yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah</b>	
Tanpa Sub Out Put	
Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi teknis penyusunan RPPLH Provinsi	Asistensi Teknis Penyusunan RPPLH Provinsi (pada Ekoregion Sulawesi) Penyusunan NSPK Tentang RPPLH Provinsi
<b>Jumlah RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah</b>	
Tanpa Sub Out Put	
Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi teknis penyusunan RPPLH kab/kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bimbingan Teknis Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota pada Ekoregion Kalimantan</li> <li>• Penyusunan NSPK RPPLH Kabupaten/Kota</li> </ul>
<b>Jumlah penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada setiap ekoregion</b>	
Tanpa Sub Out Put	
Penetapan dan update (pembaruan) indikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan dan Update (pembaruan) indikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup</li> <li>• Monitoring dan Evaluasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup</li> <li>• Pengembangan Perangkat Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah</li> <li>• Penerapan instrumen DDDTLH di daerah melalui Fasilitasi, Bimbingan Teknis dan Asistensi Teknis Penyusunan DDDTLH Daerah</li> </ul>
<b>Jumlah satuan peta ekoregion pada skala 1:250.000</b>	
Tanpa Sub Out Put	
Penyusunan/penyempurnaan peta ekoregion pada skala 1:250.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemetaan Ekoregion</li> <li>• Asistensi Penerapan Peta Ekoregion</li> </ul>
<b>Jumlah Prov/Kab/Kota yang memiliki neraca SDA LH dan PDRB Hijau</b>	
Tanpa Sub Out Put	
Layanan Internal Organisasi	Layanan Internal organisasi
Penyusunan neraca SDA LH, valuasi ekonomi SDA LH dan PDRB Hijau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi Penyusunan Neraca SDA-LH Tematik</li> <li>• Fasilitasi Penyusunan PDB / PDRB Lingkungan</li> <li>• Sinkronisasi, Integrasi dan Koordinasi dengan Instansi Terkait tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan</li> </ul>

Kegiatan/Output/Sub Output/Komponen	Kegiatan Rimci
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan NSPK dan Metode Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup</li> <li>• Sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan</li> </ul>
<b>Layanan Internal (Overhead)</b>	
Layanan Internal Overhead	
Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
<b>Layanan Perkantoran</b>	
Tanpa Sub Output	
Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan perkantoran (operasional dan pemeliharaan kantor)
<b>PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN</b>	
<b>Persentase permohonan penilaian dokumen lingkungan yang terlayani sesuai dengan NSPK dan standar pelayanan publik</b>	
Tanpa Sub Out Put	
Penilaian dokumen AMDAL dan pemeriksaan UKL-UPL serta penerbitan izin lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan serta Penerbitan Izin Lingkungan</li> <li>• NSPK Harmonisasi Penilaian Dokumen Lingkungan kegiatan Strategis Nasional</li> </ul>
Pengembangan Sistem Pengambilan Keputusan Kajian Dampak Lingkungan dan Sistem Administrasi Permohonan Izin Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan Sistem Administrasi Penilaian Dokumen Lingkungan dan Penerbitan Izin Lingkungan Secara Online</li> <li>• Pengelolaan Data Spasial dan Non Spasial Pendukung Pengambil Keputusan</li> <li>• Pengembangan Infrastruktur (ENV DSS)</li> </ul>
<b>Sistem pengambilan keputusan kajian dampak lingkungan yang efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang berkualitas (100 Persen)</b>	
Tanpa Sub Out Put	
Pengembangan NSPK sistem kajian dampak lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persiapan penyusunan draft NSPK sistem kajian dampak lingkungan sektor prioritas</li> <li>• Pelaksanaan Penyusunan pedoman sektor skala prioritas</li> <li>• Konsultasi Publik dengan Instansi terkait</li> <li>• Finalisasi Pedoman Sektor Skala Prioritas</li> <li>• Penerbitan Pedoman</li> </ul>
Pengembangan Sistem Dokumentasi Dokumen Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan Sistem Informasi Dokumentasi Pelaksanaan Dokumen Lingkungan</li> </ul>
Penilaian Audit Lingkungan dan Pelaksanaan Tindak Lanjut Permasalahan Dokumen Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penilaian usaha/kegiatan yang wajib melaksanakan audit lingkungan hidup</li> <li>• Pelaksanaan tindak lanjut permasalahan dokumen lingkungan</li> </ul>
<b>Jumlah KPA berlisensi dan pemeriksa UKL UPL daerah yang melakukan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sesuai dengan NSPK 250 daerah</b>	
Tanpa Sub Out Put	
Peralatan dan Mesin	Peralatan dan Mesin
Layanan Internal Organisasi	Layanan Internal organisasi
Pengembangan Sistem Pembinaan dan Evaluasi Kinerja KPA AMDAL Daerah dan LPJP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Juknis/Juklak sistem pembinaan dan evaluasi kinerja KPA AMDAL dan Pemeriksa UKL-UPL daerah</li> <li>• Pembinaan dan Evaluasi kinerja KPA dan Pemeriksa UKL-UPL Daerah serta Penyusunan Dokumen Amdal Perorangan dan LPJP</li> <li>• Penyusunan Laporan</li> </ul>
Pelaksanaan Bimtek dan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Kajian Dampak Lingkungan	Sosialisasi Bimtek Kajian Dampak Lingkungan di 3 Ekoregion
<b>Layanan Internal (Overhead)</b>	
Layanan Internal Overhead	
Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
<b>Layanan Perkantoran</b>	
Tanpa Sub Output	
Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan perkantoran (operasional dan pemeliharaan kantor)
<b>PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN</b>	
<b>Dokumen berita acara tata batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA</b>	
Tanpa Sub Output	
Peralatan dan Mesin	Layanan internal (overhead) - Peralatan dan mesin
Layanan Internal Organisasi	Layanan Internal organisasi
Penataan batas kawasan hutan untuk	Pelaksanaan Tata Batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA

Kegiatan/Output/Sub Output/Komponen	Kegiatan Rinci
penyelesaian TORA	
<b>Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan</b>	
Tanpa Sub Output	
Inventarisasi dan verifikasi Objek TORA dalam Kawasan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan verifikasi PTKH</li> <li>• Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi dan verifikasi</li> </ul>
<b>Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan</b>	
Tanpa Sub Out Put	
Fasilitasi rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan hutan KPH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inventarisasi Biogeofisik</li> <li>• Inventarisasi Sosial Budaya</li> <li>• Perancangan Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan</li> </ul>
<b>Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi klaster TSP/PSP</b>	
Tanpa Sub Out Put	
Inventarisasi Sumber Daya Hutan	Inventarisasi Sumber Daya Hutan (Enumerasi dan Re-Enumerasi TSP/PSP)
<b>Dokumen pengendalian pemantapan kawasan hutan</b>	
Tanpa Sub Out Put	
Layanan Internal Organisasi	Layanan Internal organisasi
Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan	Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan
Penegasan Batas Kawasan Hutan	Penegasan Batas Kawasan Hutan
<b>Layanan Internal (Overhead)</b>	
Tanpa Sub Out Put	
Pengadaan Kendaraan Bermotor	Pengadaan Kendaraan Bermotor
Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan	Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan
<b>Layanan Perkantoran</b>	
Tanpa Sub Out Put	
Gaji dan Tunjangan	Pembayaran Gaji dan Tunjangan
Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Operasional dan Pemeliharaan Kantor
<b>DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA SEKRETARIAT DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN</b>	
<b>Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) A (78 poin). Target tahun 2018 sebesar 77 poin</b>	
<b>Perencanaan Program dan Anggaran, Data dan Informasi, Evaluasi dan Pelaporan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan</b>	
Dokumen rencana dan anggaran Bidang PKTL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Lingkup Ditjen PKTL Tahun 2018</li> <li>• Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Lingkup Ditjen PKTL Tahun 2019</li> <li>• Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Ditjen PKTL Tahun 2019</li> <li>• Penyusunan Standar Kegiatan dan Biaya (SKB) Ditjen PKTL Tahun 2019</li> </ul>
Monev dan Pelaporan Pelaksanaan rencana dan anggaran, serta penyajian kinerja Bidang PKTL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monev Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (1 Dokumen)</li> <li>• Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (1 Dokumen)</li> <li>• Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (1 Dokumen)</li> <li>• Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (1 Dokumen)</li> <li>• Monev Pelaksanaan Rencana Aksi</li> <li>• Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, 1 Dokumen</li> </ul>
Layanan data dan informasi, statistik dan kehumansan bidang PKTL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelenggaraan Kegiatan Kehumansan</li> <li>• Penyusunan Buletin Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan</li> <li>• Penyusunan Bahan Rapat Pimpinan dengan DPR serta Tindak Lanjut Menteri</li> <li>• Penyusunan Buletin Teknologi Informasi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan</li> <li>• Penyusunan Buku Statistik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan</li> <li>• Penyusunan Buku Data dan Informasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2018</li> </ul>
<b>Penyusunan Dokumen Prosedur Kerja, Administrasi Kepegawaian, Administrasi Jabfung dan Peningkatan Kualitas SDM Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan</b>	
Analisis Jabatan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyempurnaan Prosedur Kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan</li> <li>• Penyempurnaan Analisa Jabatan dan Peta Jabatan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan</li> <li>• Penguatan Kelembagaan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan</li> </ul>

Kegiatan/Output/Sub Output/Komponen	Kegiatan Rinci
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi E-Kinerja Ditjen PKTL</li> <li>Pengelolaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian</li> <li>Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan</li> <li>Pembinaan aparatur Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan</li> <li>Bimbingan Teknis Implementasi Sistem Administrasi Kepegawaian dan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian</li> </ul>
Pengelolaan administrasi jabatan fungsional dan peningkatan kualitas SDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penilaian Angka Kredit Jafung Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan</li> <li>Pengelolaan Pengembangan Pegawai Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan</li> </ul>
<b>Penyusunan/ pembahasan rancangan Peraturan Perundangan, Penanganan Permasalahan Hukum dan Pengembangan Kerjasama Teknik Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan</b>	
Draft Peraturan Perundang-undangan bidang PKTL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (5 draft)</li> <li>Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan</li> <li>Fokus Group Discussion Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dan Kebijakan Strategis Pemerintah</li> </ul>
Penanganan permasalahan hukum bidang PKTL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penanganan Permasalahan Kawasan Hutan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan</li> <li>Penyusunan Penyelesaian Permasalahan Kawasan Hutan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan</li> </ul>
Pengembangan dan pemantauan kerjasama teknik bidang PKTL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan dan Pemantauan Kerjasama di bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan</li> <li>Asistensi Penyusunan dan Pengelolaan Kerjasama Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan</li> </ul>
<b>Penyusunan Dokumen SIMAK-BMN, Laporan Keuangan dan BMN, Persuratan dan Pelayanan Umum</b>	
Layanan Internal Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Layanan Internal Organisasi</li> </ul>
Laporan SIMAK-BMN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan</li> <li>Penyusunan Laporan Barang milik Negara (SIMAK-BMN) Lingkup Ditjen PKTL</li> <li>Hibah Barang Milik Negara (BMN) Lingkup Ditjen PKTL</li> </ul>
Laporan Keuangan Ditjen PKTL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Laporan Keuangan dan Hibah Luar Negeri Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan</li> <li>Rapat Koordinasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Eselon I Tahunan Tahun Anggaran 2017</li> <li>Rapat Koordinasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Eselon I Semester I TA. 2018</li> <li>Rapat Koordinasi Penyusunan LK Triwulan III TA 2018</li> <li>Bimbingan dan Pengendalian Administrasi Keuangan (Perbendaharaan)</li> </ul>
Sistem Digital Naskah Dinas, layanan penatausahaan dan persuratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penatausahaan Naskah Dinas / Persuratan Pimpinan dan Satker</li> <li>Operasional Ketatausahaan Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan</li> <li>Pengelolaan dan Penataan Arsip</li> <li>Fasilitasi Penatausahaan Pimpinan dalam rangka Kegiatan Bidang Keplanologian</li> <li>Rekonstruksi Arsip Dinamis Inaktif</li> </ul>
Laporan Penyusunan Tindak Lanjut-LHP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Penyusunan Tindak Lanjut LHP dan Penyelesaian Kasus Kerugian Negara</li> </ul>
<b>Layanan Internal (Overhead)</b>	
Layanan Internal Overhead	
Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Pengadaan Administrasi Pengelolaan perlengkapan
<b>Layanan Perkantoran</b>	
Tanpa Sub Output	
Gaji dan Tunjangan	Pembayaran Gaji dan Tunjangan
Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Operasional dan Pemeliharaan Kantor

### Lampiran 3. Kegiatan Penataan Batas Kawasan Hutan sampai dengan Tahun 2017

No.	Provinsi	TARGET TAHUN 2015		Akumulasi Realisasi s/d Tahun 2015		TARGET TAHUN 2016		Akumulasi Realisasi s/d Tahun 2016		TARGET TAHUN 2017		Akumulasi Realisasi s/d Sept Tahun 2017	
		BL (Km)	BF (Km)	BL (Km)	BF (Km)	BL (Km)	BF (Km)	BL (Km)	BF (Km)	BL (Km)	BF (Km)	BL (Km)	BF (Km)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Aceh	251,79	83,80	4.583,63	1.233,43	281,95	26,52	4.749,18	1.233,43	-	24,00	4.749,18	1.233,43
2	Sumatera Utara	815,76	118,28	8.045,91	2.002,11	619,18	22,27	8.602,26	2.002,11	361,00	-	8.602,26	2.002,11
3	Sumatera Barat	-	-	3.914,23	1.589,66	-	-	3.914,23	1.589,66	41,00	-	3.914,23	1.589,66
4	Riau	211,00	137,00	8.964,04	1.520,54	271,00	95,00	9.177,18	1.520,54	173,00	-	9.382,36	1.520,54
5	Jambi	-	-	3.728,34	800,17	-	-	3.731,78	800,17	1,55	3,85	3.731,78	800,17
6	Sumatera Selatan	45	-	4.611,76	1.044,58	1.109,97	-	4.813,76	1.044,58	176,00	32,00	4.889,76	1.076,58
7	Bengkulu	-	-	1.658,49	489,85	-	-	1.663,49	489,85	-	-	1.663,49	489,85
8	Lampung	60,00	-	3.273,02	25,01	25,00	-	3.273,02	25,01	82,00	-	3.273,02	25,01
9	Kep. Bangka Belitung	44,12	-	548,20	66,00	102,50	11,43	648,51	77,42	17,90	-	648,51	77,42
10	Kepulauan Riau	707,47	90,82	672,31	861,91	754,70	182,56	1.200,23	861,91	300,00	-	1.200,23	861,91
11	DKI Jakarta	-	-	44,00	-	-	-	44,00	-	-	-	44,00	-
12	Jawa Barat	-	-	20.189,31	17,27	-	-	20.212,85	17,27	12,00	-	20.212,85	17,27
13	Jawa Tengah	-	-	19.064,65	-	310,00	-	19.064,65	-	2,16	-	19.064,65	2,30
14	D.I. Yogyakarta	177,00	-	276,28	-	-	-	276,28	-	-	-	276,28	-
15	Jawa Timur	-	-	19.394,80	43,56	-	-	19.394,80	43,56	-	0,84	19.394,80	43,56
16	Banten	-	-	46,91	-	-	-	46,91	-	-	-	46,91	-
17	Bali	-	-	1.610,00	208,97	-	-	1.610,00	208,97	-	-	1.610,00	208,97
18	NTB	-	-	4.806,47	856,16	-	-	4.806,47	856,16	-	12,00	4.806,47	856,16
19	NTT	167,00	-	5.441,34	13,30	233,00	-	5.579,34	13,30	128,00	-	5.707,25	13,30
20	Kalimantan Barat	252,90	110,40	9.828,86	8.660,30	55.069,42	629.788,59	10.462,51	8.697,87	116,00	180,80	10.562,71	8.856,77
21	Kalimantan Tengah	682,00	-	3.969,90	3.668,22	429,21	181,97	4.258,54	3.755,67	388,20	-	5.024,20	3.755,67
22	Kalimantan Selatan	338,00	-	11.508,82	3.341,58	338,00	64,00	11.633,63	3.435,48	108,00	21,00	11.818,00	3.435,48
23	Kalimantan Timur	492,73	-	9.395,16	11.275,91	416,00	140,56	9.764,16	11.282,94	208,50	41,50	9.764,16	11.282,94
24	Sulawesi Utara	99,14	324,32	2.775,56	7.773,10	185,33	203,01	2.838,06	7.773,10	32,88	-	2.869,43	7.773,10
25	Sulawesi Tengah	300,00	-	11.423,67	6.614,62	201,16	-	11.661,67	6.614,62	292,95	27,46	11.974,26	6.614,62
26	Sulawesi Selatan	-	104,00	710,63	1.653,77	224,00	-	710,63	1.653,77	62,00	-	776,14	1.653,77
27	Sulawesi Tenggara	-	-	5.789,45	4.228,80	-	-	5.789,45	4.228,80	218,00	-	6.007,45	4.228,80
28	Gorontalo	150,00	-	5.998,64	1.013,53	157,00	5,00	6.130,86	1.018,40	13,00	-	6.130,86	1.018,40
29	Sulawesi Barat	-	-	794,94	1.331,93	-	-	913,85	1.331,93	106,00	-	1.019,09	1.331,93
30	Maluku	126,00	106,00	7.815,58	3.988,21	151,88	-	7.913,28	4.000,41	77,00	-	7.913,28	4.000,41
31	Maluku Utara	-	-	373,37	1.935,91	-	-	494,66	2.137,95	240,71	25,63	523,33	2.163,58
32	Papua Barat	235,00	457,00	1.543,69	3.201,60	294,00	-	1.711,54	3.201,60	232,00	31,00	1.711,54	3.201,60
33	Papua	-	350,00	11.916,51	11.890,80	98,00	-	12.007,39	11.890,80	85,00	58,00	12.106,67	11.890,80
JUMLAH		5.557,91	1.881,62	194.718,46	81.350,80	61.271,30	630.720,91	195.099,17	81.807,29	3.474,85	458,08	201.419,15	82.026,12

#### Lampiran 4. Kegiatan Fasilitas Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan KPH sampai dengan Tahun 2017

No	BPKH	KPHP (KPH)			KPHL (KPH)			TOTAL (KPH)		
		Target2016	Realisasi 2016	target 2017	Target2016	Realisasi 2016	target 2017	Target2016	Realisasi 2016	target 2017
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	BPKH Wilayah I Medan	35	8	3		7	-	35	15	3
2	BPKH Wilayah II Palembang		4	2		4			8	2
3	BPKH Wilayah III Pontianak	31	4	2		-		31	4	2
4	BPKH Wilayah IV Samarinda	22	4	2		1		22	5	2
5	BPKH Wilayah V Banjar Baru	3	1	1	4	2	-	7	3	1
6	BPKH Wilayah VI Manado	16	2	1	9	1	-	25	3	1
7	BPKH Wilayah VII Makassar	4	3	-	10	1	4	14	4	4
8	BPKH Wilayah VIII Denpasar	6	3	2	-	3	-	6	6	2
9	BPKH Wilayah IX Ambon	13	4	1	5	3	1	18	7	2
10	BPKH Wilayah X Jayapura	31	6	1	25	5	1	56	11	2
11	BPKH Wilayah XI Yogyakarta	0	1	-	-	-	-	0	1	-
12	BPKH Wilayah XII Tanjung Pinang	4	3	-	1	-	1	5	3	1
13	BPKH Wilayah XIII Pangkal Pinang	27	8	2	3	2	-	30	10	2
14	BPKH Wilayah XIV Kupang	2	4	1	1	7	-	3	11	1
15	BPKH Wilayah XV Gorontalo	-	1	-	-	1	-	-	2	-
16	BPKH Wilayah XVI Palu	12	1	-	3	1	2	4	2	2
17	BPKH Wilayah XVII Manokwari	16	3	2	6	1	1	22	4	3
18	BPKH Wilayah XVIII Banda Aceh		-		5	4	1	5	4	1
19	BPKH Wilayah XIX Pekanbaru	26	6	3	2	1	-	28	7	3
20	BPKH Wilayah XX Bandar Lampung	4	-	-	20	9	1	24	9	1
21	BPKH Wilayah XXI Palangkaraya	29	7	1	4	-	-	33	7	1
22	BPKH Wilayah XXII Kendari	16	5	2	9	1	2	25	6	4
<b>TOTAL</b>		<b>297</b>	<b>78</b>	<b>26</b>	<b>107</b>	<b>54</b>	<b>14</b>	<b>393</b>	<b>132</b>	<b>40</b>

## Lampiran 5. Kegiatan Fasilitas Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan KPH Tahun Anggaran 2018

NO	BPKH	PROVINSI	UNIT
1	2	3	4
1		SUMATERA BARAT	UNIT I – KPHL
2	WIL I MEDAN	SUMATERA UTARA	UNIT IV - KPHL
3			UNIT V – KPHP
4			UNIT X – KPHP
5	WIL II PALEMBANG	SUMATERA SELATAN	UNIT XVII - KPHL
6			UNIT II – KPHP
7			UNIT XII - KPHP
8	WIL III PONTIANAK	KALIMANTAN BARAT	UNIT VIII - KPHP
9			UNIT III - KPHP
10			UNIT XXXIII - KPHP
11	WIL IV SAMARINDA	KALIMANTAN TIMUR	UNIT I – KPHL
12			UNIT II – KPHP
13			UNIT IV – KPHP
14			UNIT V – KPHP
15			UNIT VII - KPHP
16	WIL V BANJARBARU	KALIMANTAN SELATAN	UNIT IV - KPHL
17			UNIT X – KPHP
18	WIL VI MANADO	MALUKU UTARA	UNIT I – KPHL
19			UNIT II – KPHL
20		SULAWESI UTARA	UNIT I – KPHP
21			UNIT III - KPHP
22			UNIT VII - KPHP
23	WIL VII MAKASSAR	SULAWESI SELATAN	UNIT II – KPHL
24			UNIT III - KPHL
25			UNIT IV - KPHL
26			UNIT VII - KPHL
27	WIL VIII DENPASAR	NUSA TENGGARA BARAT	UNIT VI - KPHL
28			UNIT X – KPHP
29			UNIT XI – KPHP
30			UNIT XXI - KPHP
31			UNIT IX - KPHL WAE RUATAN
32	WIL IX MALUKU	MALUKU	UNIT XIX - KPHP BABAR MOA
33			UNIT XI - KPHP WAE BOBOT-WAE KABA
34	WIL X JAYAPURA	PAPUA	UNIT XLIX - KPHP
35			UNIT LI – KPHP
36			UNIT LV - KPHP
37	WIL XII TANJUNG PINANG	KEPULAUAN RIAU	UNIT VI – KPHP
38			UNIT IV – KPHP
39	WIL XIII PANGKAL PINANG	JAMBI	UNIT V – KPHP
40			UNIT XI – KPHP
41		KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	UNIT IX – KPHP
42			UNIT VII - KPHL
43	WIL XIV KUPANG	NUSA TENGGARA TIMUR	UNIT XI – KPHP
44			UNIT XII - KPHL
45			UNIT XII - KPHP
46	WIL XVI PALU	SULAWESI TENGAH	UNIT XV - KPHL
47			UNIT XVIII - KPHL
48	WIL XVII PALU	SULAWESI TENGAH	UNIT XII - KPHP
49			UNIT XVI - KPHP
50			UNIT X – KPHL



<b>NO</b>	<b>BPKH</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>UNIT</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
51			UNIT VII - KPHP
52	WIL XVII MANOKWARI	PAPUA BARAT	UNIT XVIII - KPHP
53			UNIT X – KPHP
54	WIL XVIII BANDA ACEH	ACEH	UNIT IV KPHL
55			UNIT III - KPHP
56	WIL XIX PEKANBARU	RIAU	UNIT IV – KPHP
57			UNIT XI – KPHP
58	WIL XX BANDAR LAMPUNG	LAMPUNG	UNIT I – KPHP
59			UNIT XIII – KPHL
60	WIL XXI PALANGKARAYA	KALIMANTAN TENGAH	UNIT IV - KPHL
61			UNIT XII - KPHP
62			UNIT I – KPHP
63	WIL XXII KENDARI	SULAWESI TENGGARA	UNIT IX – KPHP
64			UNIT XIII - KPHL
65			UNIT IV - KPHL

## Lampiran 6. Target dan Realisasi Inventarisasi Sumber Daya Hutan

No	BPKH	2015		2016		2017	2018
		Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BPKH Wilayah I Medan	23	23	9	2	4	7
2	BPKH Wilayah II Palembang	10	10	9	9	4	7
3	BPKH Wilayah III Pontianak	18	18	4	4	5	8
4	BPKH Wilayah IV Samarinda	25	25	7	7	7	8
5	BPKH Wilayah V Banjar Baru	25	10	5	5	4	4
6	BPKH Wilayah VI Manado	10	0	4	4	4	7
7	BPKH Wilayah VII Makassar	18	18	5	5	5	7
8	BPKH Wilayah VIII Denpasar	18	26	3	3	4	10
9	BPKH Wilayah IX Ambon	25	25	22	7	4	6
10	BPKH Wilayah X Jayapura	20	0	7	3	8	6
11	BPKH Wilayah XI Yogyakarta	10	10	7	7	4	12
12	BPKH Wilayah XII Tanjung Pinang	7	7	6	9	4	10
13	BPKH Wilayah XIII Pangkal Pinang	11	11	2	2	4	10
14	BPKH Wilayah XIV Kupang	20	20	8	8	4	10
15	BPKH Wilayah XV Gorontalo	7	5	10	10	4	6
16	BPKH Wilayah XVI Palu	30	30	7	7	5	10
17	BPKH Wilayah XVII Manokwari	30	19	5	4	6	10
18	BPKH Wilayah XVIII Banda Aceh	15	11	7	3	4	4
19	BPKH Wilayah XIX Pekanbaru	7	7	5	5	4	7
20	BPKH Wilayah XX Bandar Lampung	22	22	12	12	4	10
21	BPKH Wilayah XXI Palangkaraya	8	8	3	3	4	10
22	BPKH Wilayah XXII Kendari	-	-	5	5	4	10
<b>TOTAL</b>		<b>359</b>	<b>305</b>	<b>152</b>	<b>124</b>	<b>100</b>	<b>179</b>

## Lampiran 7. Target Penyelesaian TORA Tahun 2018 \*)

No	BPKH	PROVINSI	Kab	Luas Indikatif (Ha)	Panjang Batas (km)
1	BPKH Wilayah I Medan	Sumatera Utara	13	122.248	2.163
		Sumatera Barat	8	27.701	981
2	BPKH Wilayah II Palembang	Sumatera Selatan	7	122.607	4.066
3	BPKH Wilayah III Pontianak	Kalimantan Barat	7	109.442	3.444
4	BPKH Wilayah IV Samarinda	Kalimantan Timur	4	25.337	681
		Kalimantan Utara	2	13.866	1.009
5	BPKH Wilayah V Banjar Baru	Kalimantan Selatan	8	119.368	1.468
6	BPKH Wilayah VI Manado	Sulawesi Utara	8	2.663	314
		Maluku Utara	5	105.047	2.655
7	BPKH Wilayah VII Makassar	Sulawesi Selatan	6	31.800	2.118
		Sulawesi Barat	6	24.516	2.197
8	BPKH Wilayah VIII Denpasar	Bali	-	-	-
		Nusa Tenggara Barat	4	8.492	169
9	BPKH Wilayah IX Ambon	Maluku	4	47.894	926
10	BPKH Wilayah X Jayapura	Papua	10	107.616	3.220
11	BPKH Wilayah XI Yogyakarta	Yogyakarta	-	-	1.000
12	BPKH Wilayah XII Tanjung Pinang	Kepulauan Riau	4	71.870	720
13	BPKH Wilayah XIII Pangkal Pinang	Bangka Belitung	6	11.856	127
		Jambi	9	12.904	474
14	BPKH Wilayah XIV Kupang	Nusa Tenggara Timur	14	13.871	400
15	BPKH Wilayah XV Gorontalo	Gorontalo	3	9.729	420
16	BPKH Wilayah XVI Palu	Sulawesi Tengah	7	58.036	1.907
17	BPKH Wilayah XVII Manokwari	Papua Barat	8	84.914	2.903
18	BPKH Wilayah XVIII Banda Aceh	Aceh	3	22.643	968
19	BPKH Wilayah XIX Pekanbaru	Riau	5	139.719	3.651
20	BPKH Wilayah XX Bandar Lampung	lampung	-	-	-
		Bengkulu	2	7.277	230
21	BPKH Wilayah XXI Palangkaraya	Kalimantan Tengah	6	324.687	4.554
22	BPKH Wilayah XXII Kendari	Sulawesi Tenggara	7	76.847	1.705
<b>Total</b>			<b>166</b>	<b>1.702.952</b>	<b>44.471</b>

\*) Data dapat berubah sesuai dengan revisi SK Peta Indikatif TORA

### Lampiran 8. Target dan Realisasi Sasaran Tersusunnya RPPLH Nasional dan RPPLH Daerah untuk menjadi acuan dalam RPJMN/RPJMD

No	Kegiatan	Target APBN			Realisasi		
		2015	2016	2017	2015	2016	2016
1	RPPLH Nasional Berbasis Daya Dukung Daya	1 RPPLH 2015-2019 Nasional	1 dokumen arahan implementasi RPPLH	1 dokumen	1 RPPLH 2015-2019 Nasional	1 dokumen arahan implementasi RPPLH	
2	RPPLH Provinsi	6 RPPLH provinsi pada ekoregion Jawa	7 RPPLH provinsi pada ekoregion Sumatera	5 dokumen	Laporan fasilitasi RPPLH 6 provinsi	7 RPPLH provinsi pada ekoregion Sumatera	
3	RPPLH Kab/Kota	-	10 RPPLH Kab/Kota ekoregion Jawa	10 Dokumen	-	10 RPPLH Kab/Kota pada ekoregion Jawa	
4	Penetapan Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Nasional	7 penetapan indikasi daya dukung dan daya tampung	6 penetapan indikasi daya dukung dan daya tampung (terbaharui)	2 dokumen	7 penetapan indikasi daya dukung dan daya tampung	6 penetapan indikasi daya dukung dan daya tampung (terbaharui)	
5	Penyempurnaan Satuan Peta Ekoregion Skala 1: 250.000	7 ekoregion	9 satuan peta ekoregion Sulawesi	9 satuan peta	7 ekoregion (5 pulau besar, 2 kepulauan)	9 satuan peta ekoregion Sulawesi	
6	Penyusunan Neraca SDA LH dan PDRB Hijau	1 neraca SDA LH dan PDRB Hijau Kab/Kota ekoregion Jawa	1 neraca SDA LH dan PDRB Hijau Kab/Kota ekoregion Jawa	2 dokumen	1 neraca SDA LH dan PDRB Hijau Kab/Kota ekoregion Jawa	1 neraca SDA LH dan PDRB Hijau Kab/Kota ekoregion Jawa	